



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO  
DINAS KOPERASI UKM  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Laporan Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah  
( L A K I P )  
Tahun 2022**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas pencapaian kinerja tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja di awal tahun.

Penyusunan LAKIP Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kumperindag dalam satu periode.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi dinas Kumperindag dalam pengambilan kebijakan, serta dapat bermanfaat dalam penyusunan arah strategi yang lebih baik di masa yang akan datang, dan dapat menjadi landasan untuk penyusunan LAKIP ditahun selanjutnya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta kerjasamanya dalam penyusunan LAKIP Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini.

Gorontalo, Maret 2022

Kepala Dinas Kumperindag  
Provinsi Gorontalo

**RISJON SUNGE**  
NIP. 196909241989021001



## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017- 2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran yaitu :

**a. Meningkatnya Koperasi Sehat dengan indicator kinerja Persentase Koperasi Sehat**

Capaian indicator koperasi sehat sebesar 343,8% , dari target 10% dan realisasi 34,38%. Persentase Koperasi sehat di tahun 2022 dihitung berdasarkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT tahun buku 2022 sebanyak 252 koperasi dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT sebanyak 733 koperasi (dimana jumlah koperasi aktif tahun 2022 sebanyak 985 koperasi) dikali 100 persen.

Capaian indicator ini adalah sebesar 343,8% di tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 14,48% dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2,9% dibandingkan tahun 2020.

Untuk tahun 2018 hingga 2019 masih mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis dinas yang terdapat pada Renstra sebelum revisi. Dimana indikatornya adalah jumlah koperasi berkualitas dengan capaian 6 koperasi di tahun 2019 dan 2018.





capaian indicator sasaran strategis di tahun 2022 ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sebanyak 343,8%. Dari target renstra 10% dan realisasi 10%. Capaian dari indicator kinerja ini dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2022 ini capaian kinerjanya mencapai 87,26% . dimana kinerja OPD sebesar 34,38% dan target nasional pada Kemenkopukm sebanyak 30% ditahun 2022

b. **Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas dengan indicator kinerja Rata-Rata UKM Naik Kelas**

Adapun target ukm naik kelas tahun 2022 sebesar 50 UKM dengan realisasi sebesar 60 UKM. Sehingga capaian rata-rata UKM naik kelas sebesar 132%.

Rata-Rata UKM Naik Kelas dihitung berdasarkan total UKM naik kelas tahun 2022 sebanyak 330 UKM naik kelas dibagi dengan tahun n (tahun ke 5). Capaian indikator rata-rata UKM Naik kelas ditahun 2022 sebesar 132% (Realisasi 75 UKM) mengalami kenaikan sebesar 3,13% dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (realisasi 75 UKM) dan 10 % dibanding dengan tahun 2020. Untuk capaian di tahun 2018 dan 2019 masih mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis dinas yang terdapat pada Renstra sebelum revisi yaitu UMKM Naik kelas.

Untuk capaian indicator ini jika dibandingkan dengan capaian pada renstra yaitu Capaian untuk rata-rata UKM Naik Kelas tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan 132%. dari target Renstra yang ditetapkan 50 UKM dan realisasi 66 UKM.

Capaian dari indicator kinerja ini dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2022 ini sebesar 0,00035%. Yaitu capaian OPD 66 UKM naik kelas 2022 dan capaian nasional yaitu pada kementerian Kemenkop UKM sebesar 19.000.000 UMKM naik kelas di Indonesia. UKM ini sudah berjualan di platform digital.

c. **Meningkatnya Pertumbuhan IKM dengan indicator kinerja Jumlah Penumbuhan IKM**

Jumlah penumbuhan IKM ditahun 2022 sebesar 212 IKM dari target 50 IKM di tahun 2022. Sehingga capaian sebesar 424%





“jumlah penumbuhan IKM” Tahun 2022 diperoleh dari jumlah IKM tahun n (2022) sebanyak 15.767 IKM dikurangi dengan jumlah IKM tahun (n-1) yaitu tahun 2021 sebanyak 15.555 IKM. Untuk penumbuhan IKM di tahun 2022 sebanyak 212 IKM telah tercapai dengan dukungan sumber dana APBD. Untuk capaian indikator kinerja di tahun 2022 sebesar 424% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 35,56%. Di tahun 2018-2019 indikator kinerja sasaran strategis pada renstra sebelum revisi adalah 25 IKM di tahun 2018, naik menjadi 44 IKM di tahun 2019 dengan indikatornya adalah jumlah IKM yang bersertifikat. Dan untuk indikator nilai produksi IKM di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 20%. Adapun indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada renstra yaitu sebesar 424%, dari realisasi 329 IKM dan target 50 IKM. Jumlah penumbuhan IKM di Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 212 IKM, Jumlah penumbuhan IKM di Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 212 IKM, Sepanjang tahun 2022, jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) mencapai 4,4 juta unit usaha atau sebagai mayoritas 99,7% dari total unit usaha industri di Indonesia. Sektor IKM telah menyerap tenaga kerja hingga 12,39 juta orang atau 66,25% dari total tenaga kerja di sektor industri. Sektor IKM juga telah berkontribusi sebesar 21,37% dari total nilai output industri pengolahan, Sampai triwulan III tahun 2022, telah ditaih sebanyak 17.763 wirausaha baru, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 8.019 wirausaha bar

d. **Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri dengan indikator kinerja Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat**

Di tahun 2022 capaian sebesar 8,84%. Adapun target tahun 2022 sebesar 2,15% dan realisasi 0,19% .

Laju inflasi harga terhadap kemampuan daya beli masyarakat diperoleh dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,15% dan inflasi tahun 2021 sebesar 2,59% .  
(gorontalo.bps.go.id)

Capaian indikator ini di tahun 2022 sebesar 8,84% menurun 51,27% dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 18,14%





Untuk tahun 2018 dan 2019 indikator sasaran strategis masih mengacu pada renstra sebelum revisi yaitu jumlah perdagangan antar pulau sebesar 3308 kali ditahun 2019 dan 3033 kali di tahun 2018, mengalami kenaikan sebesar 8,3% ditahun 2019.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 capaian untuk indikator sasaran strategis ini 100%. Laju inflasi harga terhadap kemampuan daya beli masyarakat diperoleh dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,15%. (*gorontalo.bps.go.id*)

Laju inflasi harga terhadap kemampuan daya beli di Provinsi Gorontalo sebesar 0,19%. Lebih rendah dari tingkat inflasi di Indonesia yang sebesar 5,51%. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami inflasi 5,51% sepanjang 2022. Angka ini menjadi rekor inflasi tertinggi dalam 8 tahun terakhir. inflasi tertinggi sepanjang 2022 terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, yakni 15,26% dengan andil 1,84%

e. **Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan indikator kinerja Persentase Barang Beredar sesuai Ketentuan.**

Di tahun 2022 capaian sebesar 100%. Dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Untuk persentase barang beredar sesuai ketentuan diperoleh dari total hasil temuan yang ditindaklanjuti sebesar 91 temuan dibagi dengan total temuan yang terjadi sebesar 91 temuan di tahun 2022 capaian indikator di tahun 2022 sebesar 100% mengalami penurunan 8,12% dibandingkan tahun 2021 dengan realisasi 108,84%. Indikator sasaran strategis ini mengacu pada Renstra Revisi.

Tahun 2022 capaian untuk indikator sasaran strategis ini 100% dan capaian nasional sebesar 56%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo ke depan, sebagai berikut:





1. Melakukan sinergi dengan para pelaku pembangunan sector ekonomi lainnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.
2. Melakukan pendampingan, bimbingan dan pengawasan khusus dalam pengelolaan dan manajemen perkoperasian serta peningkata SDM koperasi sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap perkoperasian yang akan berdampak juga pada peningkatan koperasi sehat dan berprestasi
3. Penguatan SDM KUKM dan IKM antara lain melalui program stimulan bagi pelaku usaha KUKM dan juga mengoptimalkan kelas bisnis UKM, pelatihan dan pendampingan
4. Peningkatan strategi pemasaran produk ukm/ikm melalui markeplace
5. Peningkatan sarana dan parasarana bagi para UKM/IKM
6. Memaksimalkan kerjasama dan jalinan kemitraan dengan swasta
7. Mengupayakan pemanfaatan pelabuhan laut sebagai sarana export bagi produk unggulan daerah dengan mengoptimalkan pengawasan perbatasan sehingga tidak lagi komoditi export yang diantar pulaukan
8. Membangun jaringan kerjasama antara para pelaku usaha UKM sebagai calon exporter daerah dan dukungan regulasi untuk biaya form e semua tujuan export sehingga memudahkan para exportir dalam melaksanakan export

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo dalam perbaikan kinerja ditahun yang akan datang

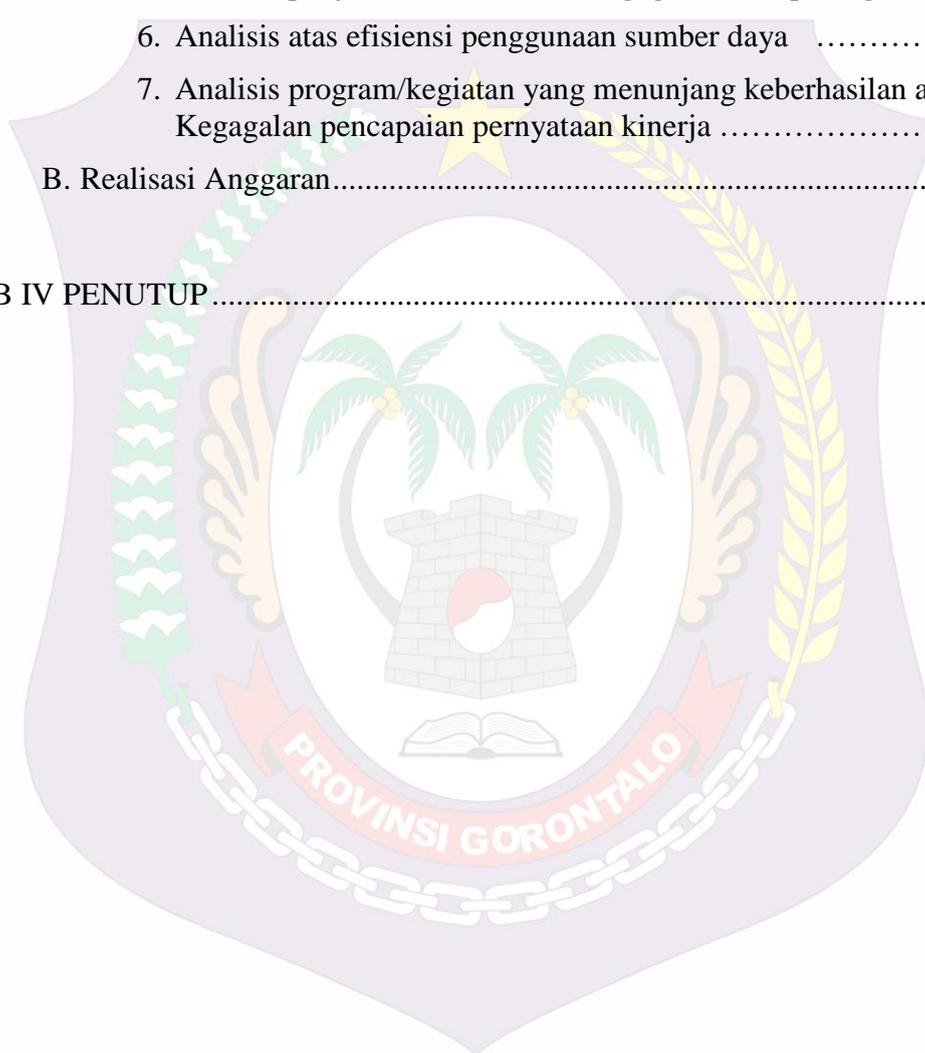


## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BABI. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	3
B. Landasan Hukum .....	4
C. Tujuan .....	4
D. Gambaran Umum OPD .....	4
E. Isu-Isu Strategis Organisasi.....	14
F. Keadaan Pegawai .....	16
G. Sarana Prasarana Kantor .....	21
H. Sistematika Penyusunan LAKIP .....	27
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	29
A. Rencana Strategis .....	29
1. Visi dan Misi Kepala Daerah .....	29
2. Tujuan Perangkat Daerah .....	33
3. Sasaran Strategis.....	34
4. Strategi dan Arah Kebijakan .....	35
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	41
C. Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	42
D. Instrumen Pendukung.....	48
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	53
A. Capaian Kinerja Diskumperindag Prov. Gorontalo .....	53
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022... ..	54
2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun yang lalu .....	56



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 Jangka. menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	59
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar Nasional .....	62
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan ...	65
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	71
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	73
B. Realisasi Anggaran.....	107
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>112</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut JenisKelamin Per 31 Desember 2022 .....	16
Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2022.....	17
Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan Per 31 Desember 2022 .....	19
Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2022 .....	20
Tabel 1.5. Asset Tanah dan Gedung .....	21
Tabel 1.6. Kendaraan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2020.....	27
Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022.....	32
Tabel 2.2. Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.....	33
Tabel 2.3. Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 .....	35
Tabel 2.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 .....	35
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	42
Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo .....	44
Tabel 3.1. Skala Penilaian Capaian Kinerja .....	53
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	54
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	55
Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Lalu .....	56
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Lalu.....	57



Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPJMD.....	60
Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra .....	61
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2021 dengan Standar Nasional.....	62
Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2022 dengan Standar Nasional.....	63
Tabel 3.10. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	71
Tabel 3.11. Daftar Koperasi Berprestasi Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	76
Tabel 3.12. Daftar Pemeriksaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Primer Provinsi Gorontalo Tahun 2022 .....	77
Tabel 3.13. Daftar Koperasi Penerima Hadiah Penilaian Koperasi Sehat Kepatuhan tahun 2022 .....	79
Tabel 3.14. Rekap Realisasi Export Berdasarkan Komoditi Selang Bulan Desember Tahun 2022 .....	101
Tabel 3.15. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2022 .....	110
Tabel 3.16. Analisis Efisiensi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	111





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Dinas Kumperindag .....	6
Gambar 1.2.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin .....	17
Gambar 1.3.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan.....	18
Gambar 1.4.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan .....	19
Gambar 1.5.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon .....	20
Gambar 2.1.	Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo .....	49
Gambar 2.2.	Aplikasi SIPAP .....	49
Gambar 2.3.	Aplikasi SIKP.....	50
Gambar 2.4.	Aplikasi Online Data System.....	51
Gambar 2.5.	Aplikasi SIInas .....	51



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang wajib dibuat oleh setiap OPD yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan menteri untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; yang antara lain mewajibkan seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara untuk membuat penetapan kinerja disamping itu juga dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem pelaporan ini mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintahan, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporannya.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Koperasi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo memiliki peran yang sangat strategis, karena memberikan informasi penting antara lain:

1. Menjelaskan hasil evaluasi kinerja Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selama setahun
2. Menjadi tolak ukur untuk penyusunan rencana kerja di tahun selanjutnya.
3. Sebagai bahan pelaporan bagi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
4. Sebagai dasar pengambilan keputusan Rencana Strategi di tahun selanjutnya.



## B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini, antara lain

1. Undang-Undang nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (lembaran Negara nomor 4060);
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tertulis: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara RI nomor 4421);
3. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara RI nomor 4437);
4. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
6. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.



### C. Tujuan

Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai –nilai akuntabilitas menuju Good Government yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sangat diperlukan. LAKIP Diskumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kumperindag dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang
2. LAKIP sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan , yaitu Gubernur Gorontalo sebagai Kepala Daerah Provinsi Gorontalo

### D. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, tugas fungsi serta struktur organisasi Diskumperindag adalah sebagai berikut :

#### 1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menjalankan tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Tugas tersebut diatas merupakan tugas kelembagaan, yang menjadi tanggung jawab seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, guna menyelesaikan dan menindaklanjuti pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai bidang kewenangan yang dimiliki, yang dilandasi dengan 5 (lima) Nilai Budaya Kerja, yakni :



- Inovasi (*Innovation*)
- Kerjasama Tim (*Team Work*)
- Membangun Kepercayaan Masyarakat (*Trust Worthiness*)
- Membangun Kesejahteraan Masyarakat (*Prosperity*) dan
- Cepat (*Speed*).

## 2. Fungsi

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

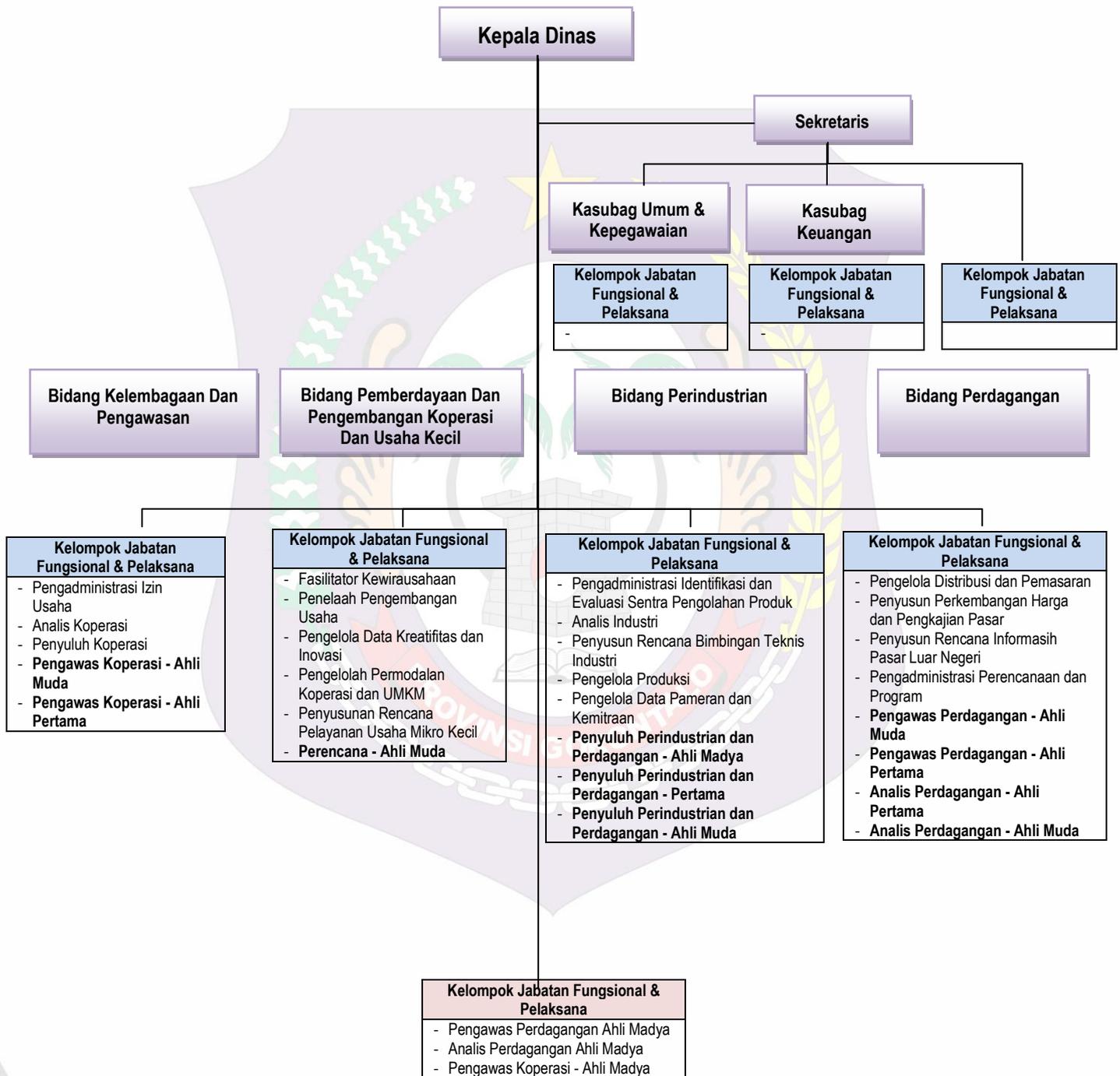
- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

## 3. Struktur Organisasi, SDM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Struktur organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, ditetapkan dengan format sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI UKMP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI GORONTALO**



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKMPerindustrian dan Perdagangan



Dinas koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan 3 Orang Kepala Bidang serta 1 (satu) Kepala Balai

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

❖ Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan:
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan,
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan,
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo,
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat:



- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan:
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil,
- e. Bidang Perindustrian,
- f. Bidang Perdagangan, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

▣ **Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas :**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Bidang Perdagangan yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur..

Dalam melaksanakan Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan sasaran dan kebijakan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan,
- b. penetapan Program dan Kegiatan Dinas:
- c. pembinaan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas,
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang kebijakan bidang Koperasi, MKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.

▣ **Tugas pokok dan fungsi Sekretariat :**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;



- c. pengelolaan umum dan Kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menatausahakan pengelolaan keuangan
- b. menghimpun dan mengolah data keuangan
- c. menyusun laporan keuangan SKPD;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD,
- e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran,
- f. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
- g. menyiapkan dan menerbitkan SPM,
- h. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran,
- i. mengelola pembayaran gaji pegawai,
- j. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran,
- k. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ,
- l. membuat laporan pengesahan SPI, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak /Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak,
- m. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi,
- n. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian,



- o. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA,
- p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan: dan
- q. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran

## 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan,
- c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan:
- d. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris,
- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah,
- f. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi,
- g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur:
- h. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran,
- i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan,
- j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris:
- l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya:
  - n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris:
  - o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT:
  - p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM),
  - q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural,
  - r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit:
  - s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan:
  - t. melaksanakan tugas kehumasan,
  - u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas,
  - v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang dan kearsipan dinas, dan
  - w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

▣ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, melaksanakan penyuluhan, bimbingan teknis, pengembangan, supervisi dan pengawasan kelembagaan usaha, permodalan koperasi, pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam pengembangan kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi:



- b. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian,
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan standarisasi organisasi, tatalaksana dan pemingkatan koperasi,
- d. pelaksanaan penyuluhan, pengembangan organisasi, dan tatalaksana koperasi:
- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha dan permodalan koperasi,
- f. melakukan pemeriksaan kelembagaan koperasi:
- g. melakukan pengawasan pemeriksaan KSP dan USP:
- h. penerapan sanksi, dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

■ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan**

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan UKM, melaksanakan pembinaan, pengembangan kelembagaan data dan pemberdayaan, promosi dan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan teknis dan pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan manajemen, data dan informasi pembiayaan Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah:
- b. penyusunan pedoman kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, bagi Koperasi, dan UKM,
- c. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan sistem promosi, dan pemasaran UKM,
- d. mengawasi pelaksanaan pembinaan pengembangan kelembagaan pemberdayaan UKM/ promosi dan pemasaran produk UKM,



- e. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan data UKM secara periodik:  
dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan UKM.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

❑ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha baru, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. Dalam melaksanakan tugas, bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan industri,
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, serta promosi industri,
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan serta promosi industri,
- d. penyiapan bahan dan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan teknis dibidang industri:
- e. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha dan sarana dibidang industri:
- f. merencanakan koordinasi dan pembinaan tehnis pengembangan komoditi industri, dan
- g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang industri.



Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana..

☐ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada urusan perdagangan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan konsumen, promosi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan,
- b. perumusan pembinaan, pengawasan, standarisasi dan perlindungan konsumen, pendistribusi barang dan jasa lintas kab/kota,
- c. melakukan kerjasama dagang dalam Tangka peningkatan produksi dalam negeri,
- d. pelaksanaan kegiatan misi dagang nasional dan mternasional,
- e. pelaksanaan kegiatan operasi pasar dan pasar murah di kabupaten/kota:
- f. pelaksanaan bimtek bagi SDM perdagangan, dan
- g. perumusan laporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perdagangan.

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

**E. Isu-Isu Strategis Organisasi**

Isu-isu strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo periode 2017-2022 sebagai berikut:

**1. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang



lebih besar, masih sangat rendah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah;

- a. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM
- b. Rendahnya kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar

Belum terbangunnya kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM. kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jati diri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

## **2. Bidang Perindustrian**

Isu strategis di bidang perindustrian adalah pemasaran hasil industri masih bersifat local, peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kuantitas dan kualitas produksi yang dihasilkan rendah, masih tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku import, Industri pengolahan yang ada belum variatif dan inovatif, masih rendahnya kualitas manajemen pengelolaan industri kecil menengah di daerah dan masih rendahnya kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan.

## **3. Bidang Perdagangan**

Isu strategis di bidang perdagangan adalah belum baiknya system distribusi barang dan jasa serta masih rendahnya akses pasar luar negeri. Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Belum membaiknya system distribusi barang ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi), belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen, serta terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi. Demikian halnya dengan kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi. Disamping itu, permasalahan lainnya yang perlu memperoleh perhatian adalah masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.



Sedangkan rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk *market intelegent*), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.

#### 4. Bidang Pelayanan OPD

Isu strategis di bidang pelayanan SKPD adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik SKPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan monev program baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan SKPD.

#### F. KEADAAN PEGAWAI

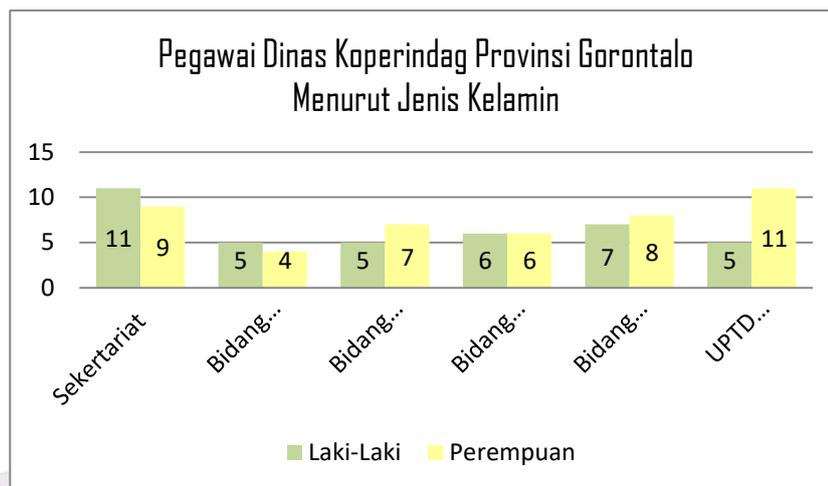
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai. Secara umum Sumber daya manusia/aparatur pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

##### a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2022

No.	Unit Organisasi	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	11	9	20
2	Bidang Koperasi	5	4	9
3	Bidang UMKM	5	7	12
4	Bidang Industri	6	6	12
5	Bidang Perdagangan	7	8	15
6	UPTD BPSMB	5	11	16
<b>JUMLAH</b>		<b>39</b>	<b>45</b>	<b>84</b>

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022



Gambar 1.2. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin

Data diatas menunjukkan proporsi pegawai di lingkup Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh pegawai perempuan dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Dimana Jumlah pegawai perempuan mencapai 54,57% sedangkan pegawai laki-laki 46,43 %. Konsentrasi pegawai terbanyak di bagian Sekretariat sebanyak 20 orang, kemudian diikuti oleh UPTD BPSMB dan Bidang perdagangan masing-masing 15 Orang.

Berdasarkan proporsi tersebut diatas, maka penyebaran dan jumlah pegawai di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memenuhi unsur kesetaraan gender dalam MDG's.

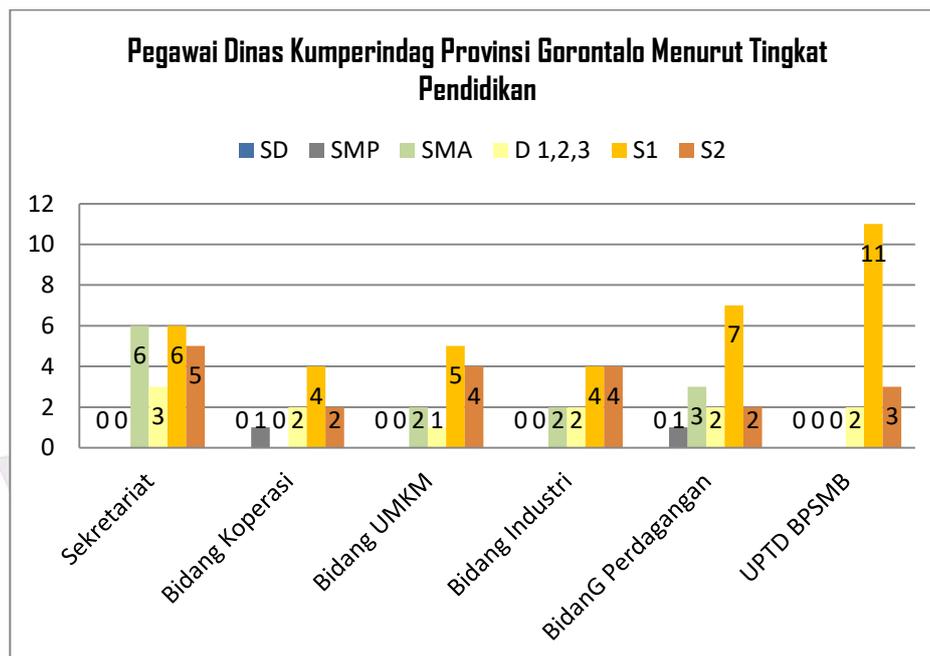
Adapun keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2022

No	Unit Organisasi	SD	SMP	SMA	D 1,2,3	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	6	3	6	5	20
2	Bidang Koperasi	-	1	-	2	4	2	9
3	Bidang UMKM	-	-	2	1	5	4	12
4	Bidang Industri	-	-	2	2	4	4	12
5	Bid. Perdagangan	-	1	3	2	7	2	15
6	UPTD BPSMB	-	-	-	2	11	3	16
<b>JUMLAH</b>		-	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>84</b>



Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022



Gambar 1.3. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah jenjang S2 dan tidak ada pegawai yang berpendidikan SD. Adapun keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan 44,05% berpendidikan S1 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 40,23%. Kemudian untuk ASN yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebesar 23,81%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 22,99%. Begitupun halnya dengan ASN yang memiliki pendidikan D1,D2,D3 tahun 2022 sebesar 14,28%, adapun pada tahun 2021 sebesar 13,79%. Untuk jenjang pendidikan SMA ditahun 2022 sebesar 15,48% dan jenjang SMP sebesar 2,38%.

Berdasarkan data tersebut diatas maka pengembangan SDM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo masih diperlukan dalam rangka penyiapan SDM yang handal dan professional, serta mendorong pegawai yang berpendidikan setara SMA dan Diploma untuk mengikuti pendidikan S1 sesuai keahlian. Meskipun telah terlihat adanya peningkatan dari pendidikan jenjang SMA ke S1.

Upaya meningkatkan jumlah PNS dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus diikuti pula dengan upaya yang sistimatis terhadap



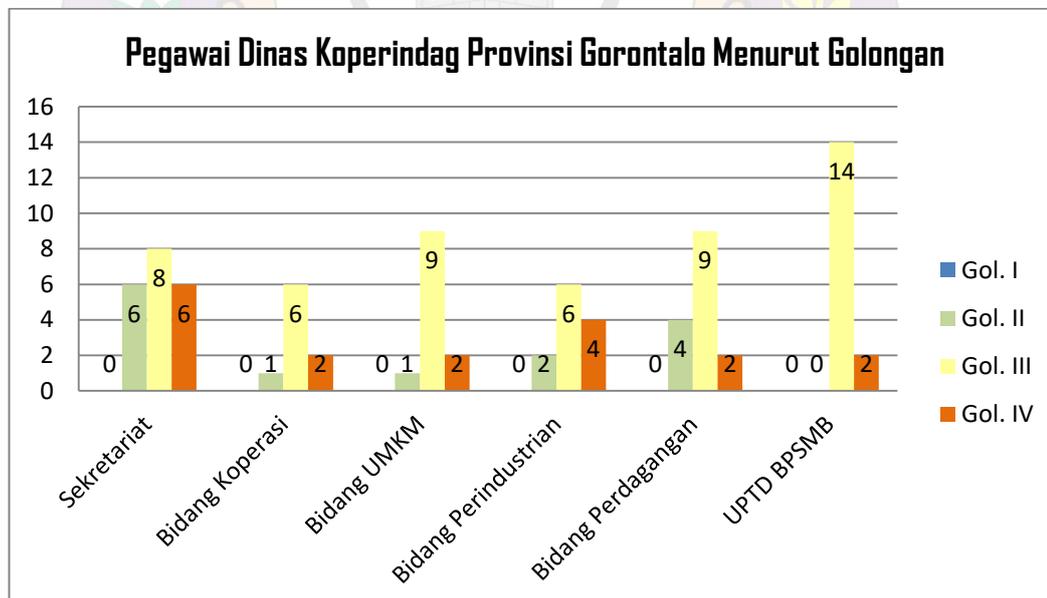
kesesuaian disiplin ilmu dengan tupoksi OPD. Dengan begitu, pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat ditingkatkan.

Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menurut Golongan Per 31 Desember 2022

No	Unit Organisasi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	6	8	6	20
2	Bidang Koperasi	-	1	6	2	9
3	Bidang UMKM	-	1	9	2	12
4	Bidang Perindustrian	-	2	6	4	12
5	Bidang Perdagangan	-	4	9	2	15
6	UPTD BPSMB	-	-	14	2	16
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>14</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>84</b>

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022

Berdasarkan tabel diatas maka keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan terdiri dari 16,67% golongan II, 61,90% golongan III dan 21,43 % golongan IV.



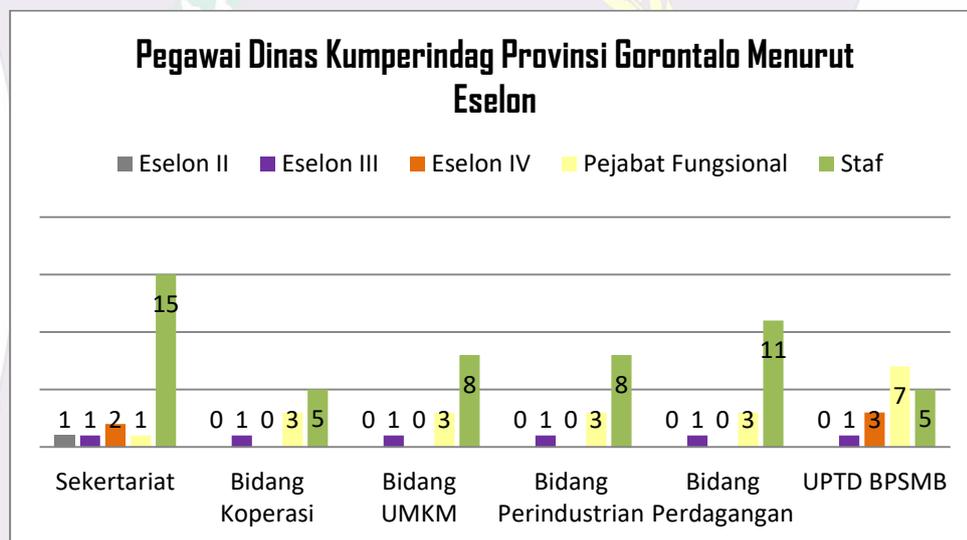
Gambar 1.4. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan



Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2022

No	Unit Organisasi	Eselon			Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
		II	III	IV			
1	Sekretariat	I	I	2	1	15	20
2	Bidang Koperasi	-	1	-	3	5	9
3	Bidang UMKM	-	1	-	3	8	12
4	Bidang Perindustrian	-	1	-	3	8	12
5	Bidang Perdagangan	-	1	-	3	11	15
6	UPTD BPSMB	-	1	3	7	5	16
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>84</b>

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022



Gambar 1.5. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon

Keadaan pegawai menurut eselon menunjukkan jumlah pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo urusan wajib dengan komposisi pejabat eselon II sebanyak 1 orang (1,190%), pejabat eselon III berjumlah 6 orang atau 7,14 % dan pejabat eselon IV berjumlah 5 orang atau 5,95%. Dari komposisi ini terlihat bahwa tenaga atau pejabat fungsional di lingkup Dinas Kumperindag pada urusan Koperasi & UKM tersedia sebanyak 20 orang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penambahan jumlah pejabat fungsional di tahun 2022 karena adanya penyetaraan jabatan dari struktur Eselon IV ke pejabat fungsional.



## G. SARANA PRASARANA KANTOR

Dalam mewujudkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan bidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo didukung oleh sarana dan prasarana antara lain :

### 1. Tanah dan Bangunan

Tanah dan bangunan gedung merupakan fasilitas vital yang dimiliki oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Hingga 31 Desember 2021 tanah dan gedung yang tercatat sebagai aset Dinas Kumperindag dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5. Asset Tanah dan Gedung

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15,424.00	2004	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila	Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	Belanja Pengadaan Tanah Tahap I Sertifikat Asli ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0	2004	Jln Tengah Desa Toto Selatan		Belanja Pengadaan Tanah Tahap II
3	Tanah Bangunan Laboratorium	8,769.00	2004	Jln Tinaloga Desa Toto Utara Kec. Kabila	UPTD. Balai Metrologi	Sertifikat Asli ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo
4	Tanah Lapangan Taman lainnya	243	2007	taman wisata iluta		Bukan Taman Wisata Iluta, tetapi Taman Wisata di Area KIAT senilai Rp. 20.000.000,
5	Tanah Lapangan lainnya	23,100.00	2013	Kelurahan Buliide		Diperoleh dari Pemerintah



No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
						Provinsi Sulawesi Utara, Sertifikat di Dinas Keuangan dan Aset Provinsi Gorontalo
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15242	12/31/2005	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab.Bone Bolango		Gedung Pusat Promosi (Gedung Kantor Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo) Tahun 2005
7	Taman lainnya	8769		Jl.Tinaloga Desa Toto Selatan Kab.Bone-Bolango		Bangunan Pagar UPTD. Metrologi dan UPTD. BPSMB Tahun 2005
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	383,66	12/31/2006	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung Kantor UPTD. Metrologi Tahun 2006
9.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8769	12/31/2006	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung UPTD. BPSMB (diperoleh awal Rp. 401.466.000,- tambahan rehab 2012 dikapitalisasi sebesar Rp. 218.997.500,-) Tahun 2006 Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006
10	Bangunan Gudang Lain-Lain (dst)	148		Jln Tinaloga Desa Toto Utara Kec. Kabila		Gedung Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006



No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
11	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	66,5	12/31/2006	Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Bakso Ikan, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
12	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	108		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Jagung, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
13	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	93.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Pakan Ternak, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
14	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	66.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Cabe Bubuk, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
15	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	87,5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Jahe, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
16	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	53,48		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Tempat Genset, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
17	Bangunan Gedung Pabrik	87,5		Desa Bube Kec. Suwawa		Gedung Pengolahan Saos Tomat,



No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
	Permanen			Kab. Bone Bolango		Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
18	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	89		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Bangunan Pabrik VCO, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
19	Taman lainnya	1.65		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Pembangunan Pagar Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
20	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	70,5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Hasil Produksi (untuk Kegiatan Fasilitas Pengembangan Teknologi Inkubator Teknologi dan Bisnis) Tahun 2008
21	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	75,85		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Gedung Stand Pameran, Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2008
22	Taman lainnya	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pondasi Pagar Kantor Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2008
23	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	8769		Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolangomu		Gedung Laboratorium UPTD. Metrologi Dinas Kopperindag Provinsi



No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
						Gorontalo
24	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	63		Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gudang Arsip dan Inventaris Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2013
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen	43,37				pekerjaan pembangunan gedung pelayanan tera-tera ulang uptd. metrologi
26	Gedung Garasi/Pool Permanen	34,1		Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Garasi Kendaraan Dinas
26	Bangunan Gedung Pabrik permanen	43,37				Gedung Pabrik Es di Provinsi Gorontalo pada Kegiatan Pengembangan Industri Terpadu
27	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	565,8				
28	Pagar permanen	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pagar Depan Kantor
29	Taman lainnya	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan		Pagar Kantor Keliling



No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengandaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
				Kab. Bone Bolango		
30	Pagar Permanen	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		
31	Bangunan Kolam/Bak Ikan			Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		
32	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	129600		Jl.Tinaloga Ds toto Utara.Kec tilong kabila		Rumah Genset BPSMB
	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango		Gazebo
	Gedung Pos Jaga Permanen					
	Taman Semi Permanen			Jl.Toto Selatan Kec Kabila Kab Bone Bolango		
	Taman Semi Permanen	980		Jl.Toto Selatan Kec Kabila Kab Bone Bolango		
	Pagar Semi Permanen	54		Jl.Toto Selatan Kec Kabila Kab Bone Bolango		

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2022



## 2. Kendaraan Dinas

Salah satu aspek pendukung operasional tugas pokok dan fungsi Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo adalah kendaraan dinas roda dua maupun roda empat. Adapun jumlah kendaraan dinas per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6. Kendaraan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Kendaraan Roda Dua / Motor	23 unit
Kendaraan Dinas Plat Merah / Non KDO	7 unit
<b>Total</b>	<b>30 unit</b>

## H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Adapun sistematika penyusunan LAKIP Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Gambaran Umum OPD
- E. Isu-Isu Strategis Organisasi
- F. Keadaan Pegawai
- G. Sarana & Prasarana Kantor
- H. Sistematika Penyusunan

### BABII PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- C. Rencana Anggaran Tahun 2022
- D. Instrumen Pendukung

### BABIII AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Diskumperindag Provinsi Gorontalo
  1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022
  2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun yang lalu



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)
  4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional
  5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Keuangan

#### BAB IV PENUTUP





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2017-2022, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017, yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis. RPJMD Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan dokumen landasan dan acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kumperindag mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Dengan strategi yang terarah, fokus dan relevan dengan kebutuhan daerah, maka Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi SKPD dengan potensi, peluang, kendala yang dihadapi serta sumberdaya yang dimiliki dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

#### 1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 ini tidak terlepas dari penjabaran dari dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM



Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun pada sektor koperasi UKM perindustrian dan perdagangan di Provinsi Gorontalo dan dokumen tersebut merupakan penjabaran teknis dari dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, maka visi pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 adalah :

*“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera”*

Adapun Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 tersebut mengandung 2 (dua) unsur makna penting, yaitu :

*“Gorontalo Maju dan Unggul”*, mengandung arti bahwa kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. sementara unggul yang dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan kelautan perikanan serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

*“Gorontalo Sejahtera”*, yaitu 1) kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan ekonomi, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*), dan terciptanya imtaq, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka dilakukan 5 (lima) misi rencana pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini diprioritaskan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi ,





- mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
  4. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas imtaq, pendidikan, kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
  5. Terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintahan yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

Dari penelaahan visi misi Gubernur Gorontalo periode 2017-2022, maka harapan pembangunan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yaitu tercermin pada misi pertama yang mengandung pengertian bahwa pembangunan sektor Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan difokuskan untuk Mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di bidang Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam rangka pembangunan daerah bidang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan yang bertanggung jawab, efektif dan efisien, maka diperlukan sinergi dan interaksi yang konstruktif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melalui Rencana Strategis Tahun 2012-2017 menetapkan Visi ***“Percepatan Pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing”*** dengan Misi :

1. Mendorong Pertumbuhan dan Perluasan Usaha Koperasi dan UKM;
2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Industri Kecil Menengah;
3. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa serta Perluasan Akses Pasar Luar Negeri; dan
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.



**Pemerintah Provinsi Gorontalo**  
**Dinas KUMPERINDAG**

Visi Percepatan Pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing mengandung makna suatu upaya yang dilakukan secara cepat, cermat dan cerdas menuju perubahan bentuk kearah yang lebih baik-*produktif, kompetitif dan mandiri* melalui pemberdayaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada secara efektif, efisien, terukur dan berkelanjutan, sehingga akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera"				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.	Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Persentase Kerjasama Investasi di bidang Koperasi	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat
		Rata-Rata Produktivitas UKM	Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas
	Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB Perdagangan	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat



"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera"				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi I. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan	Peningkatan Peran IKM dalam Perekonomian Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Gorontalo maka yang menjadi tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo di Bidang Kumperindag tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Base Line 2017	Target Tahunan					Target Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Nilai Tukar Petani	102,80	103,32	104,09	104,86	105,63	106,40	106,40
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	7,02	7,18	7,19	7,21	7,24	7,27	7,27
	Laju Inflasi (%)	4,53	3,80	3,67	3,54	3,42	3,30	3,30

Berangkat dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berupaya mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu: "Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB".

## 2. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran strategis merupakan bagian integral dari perencanaan strategis sekaligus menjadi dasar yang kuat dalam mengendalikan, memantau dan mengukur pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, dengan



asumsi bahwa jika seluruh sasaran strategis telah dicapai maka dengan sendirinya tujuan strategis pun akan tercapai. Indikator tujuan dapat diukur melalui indikator sasaran.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan didasarkan pada isu-isu aktual dan analisa sehingga Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat secara tepat menentukan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Melalui perumusan tujuan strategis, Dinas Kumperindag dapat mengukur sejauh mana visi dan misi dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Berdasarkan visi dan misi tersebut diatas, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk 5 (lima) tahun sebagaimana jangka waktu Renstra.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2017-2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2017-2022 , maka Tujuan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah :

- 1). Peningkatan Pemberdayaan Koperasi & UKM
- 2). Peningkatan Peran IKM Dalam Perekonomian Daerah
- 3). Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

- 1). Persentase kerjasama investasi di bidang koperasi
- 2). Rata-rata produktivitas UKM
- 3) Pertumbuhan PRB Sektor Industri
- 4) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB Perdagangan

### **3. Sasaran Strategis**

Berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3 Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2017	Target Tahunan				Target Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	Koperasi Berkualitas	10%	10%	10%	10%	10%	10%
1	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2	Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM
3	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	50	50	50	50	50	50
4	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	4,34%	4,34%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%
5	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan	60%	60%	70%	80%	90.00%	100.00%

#### 4. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	Mendorong Koperasi aktif untuk melaksanakan RAT melalui penguatan kelembagaan, usaha dan permodalan serta memfasilitasi kerjasama koperasi dengan lembaga usaha lainnya	Penguatan Kelembagaan, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi melalui peningkatan SDM



Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	Peningkatan Jaringan kerjasama dan penguatan manajemen usaha pelaku UKM	1. Pengembangan Kerjasama UKM dan Informasi serta Pengembangan Pemasaran Hasil Produk UKM  2. Pengembangan Wirausaha Mikro untuk Naik Kelas
Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat  Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan	Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan komoditi ekspor dan penciptaan iklim usaha antar pulau serta pengawasan perbatasan dan hubungan yang lebih berkeadilan antara pelaku usaha dan konsumen	1. Meningkatkan iklim usaha hubungan yang sehat antar pelaku usaha dan konsumen serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok  2. Menyelenggarakan perlindungan konsumen yang sinergis, harmonis dan terintegrasi terhadap komoditi ekspor unggulan yang efektif lintas daerah, lintas sektor dan lintas pelaku usaha
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	Mendorong peran IKM dalam perekonomian daerah melalui jumlah usaha IKM yang dibentuk dan difasilitasi menjadi industri yang mampu dan mandiri	Pengembangan industri kecil menengah melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha

Dalam Pencapaian misi Pemerintah Daerah ini, maka Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan menjabarkannya menjadi tujuan perangkat daerah yaitu

- 1). Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM
- 2). Peningkatan peran IKM dalam perekonomian daerah
- 3). Peningkatan kontribusi sektor perdagangan

dengan indikator tujuan yaitu :

- 1). Persentase kerjasama investasi di bidang koperasi



- 2). Rata-Rata Produktivitas UKM
- 3). Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
- 4). Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB Perdagangan

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka dijabarkan kembali menjadi sasaran yaitu

- 1). Meningkatnya Koperasi Sehat
  - 2). Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas
  - 3). Meningkatnya Pertumbuhan IKM
  - 3). Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri
  - 4). Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan
- dengan indikator sasaran yaitu :

- 1). Persentase Koperasi Sehat
- 2). Rata-Rata UKM Naik Kelas
- 3). Jumlah Penumbuhan IKM
- 4). Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat
- 5). Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan

Pencapaian kinerja pada **indikator tujuan pertama**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- 1). Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi berkualitas, jumlah koperasi berprestasi

Prioritas kegiatan adalah:

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

(Termasuk DAK Non Fisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM & Ketenagakerjaan)

- 2). Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi berprestasi



Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat

3). Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan

Prioritas kegiatan adalah:

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Perluasan Akses Pasar Akses Pembiayaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha

4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah persentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan pelaporan.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,



~Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

~Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pencapaian kinerja pada *indikator tujuan kedua*, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

5). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);

Outcome program ini adalah jumlah UKM yang dibina/naik kelas, melalui kegiatan

Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

6). Program Pengembangan UMKM

Outcome program ini adalah jumlah UKM yang dibina/naik kelas, melalui kegiatan

Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Pencapaian kinerja pada *indikator tujuan ketiga*, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

7). Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri :

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



- Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- 8). Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional :
- Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Pencapaian kinerja pada *indikator tujuan keempat*, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- 9). Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
- Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
  - Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian  
Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi
  - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
- 10). Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan  
Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



11). Program Pengembangan Ekspor

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi  
Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Perpres No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun petunjuk Teknis tentang penyusunan Kinerja yakni:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur,
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Petunjuk teknis tentang penyusunan perjanjian kinerja tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja  
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Gorontalo Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	10 %
2	Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	50 UKM
3	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	50 IKM
4	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli	2,15 %
5	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar sesuai Ketentuan	100%

### C. Rencana Anggaran Tahun 2022

Dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2022, Alokasi anggaran Dinas Kumperindag sebesar **Rp. 26.207.354.748,-** anggaran ini sudah termasuk gaji, tunjangan ASN dan DAK non fisik. Pada beberapa program/kegiatan melakukan revisi belanja total sebesar Rp. 40.399.399,-

Di tahun 2022 Dinas Kumperindag mendapat tambahan anggaran pada APBD-P sebesar Rp. 2.066.234.949,- kemudian tambahan anggaran melalui sumber dana DID Periode 1 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (pada sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi, sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Tambahan anggaran melalui sumber dana DID Periode 2 sebesar Rp. 3.853.669.874,- (pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat).



Sehingga total pagu akhir tahun 2022 Diskumperindag provinsi Gorontalo sebesar **Rp. 38.167.659.012,-** (tiga puluh delapan milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua belas rupiah).

Sehingga Implementasi rencana strategis tahun 2017-2022 untuk tahun 2022 yang mencakup pelaksanaan program/kegiatan mendapat dukungan anggaran total sebesar Rp. 38.167.659.012,- (melalui sumber dana APBD dan DID periode 1 dan periode 2) yaitu :

**+** *Pagu Tahun Anggaran 2022*

- **Belanja Operasi** : **Rp. 33.986.235.004**
  - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.525.980.406
  - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 24.460.254.598
- **Belanja Modal** : **Rp. 4.181.424.008**

**+** *Realisasi Anggaran :*

- **Belanja Operasi** : **Rp. 32.706.399.066**
  - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.210.213.660
  - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 23.496.185.406
- **Belanja Modal** : **Rp. 3.467.339.089**

Anggaran ini untuk mendukung pelaksanaan progerdiri atas 11 program, 18 kegiatan dan 23 sub kegiatan (termasuk DAK Non Fisik). Ditahun 2022 capaian indikator program telah tercapai. Adapun untuk capaian indikator kegiatan yang belum tercapai antara lain :

- jumlah revitalisasi koperasi,
- Jumlah Industri Agro Terpadu (0) dari target 1 industri agro terpadu, dimana Untuk target 1 (satu) industri agro belum ada realisasinya di tahun 2022 karena Rencana untuk membentuk 1 (satu) UPTD Pengembangan Produk dan Kemasan masih menunggu Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, \
- Jumlah UKM yang memahami prosedur ekspor target 20 calon exportir, capaian 0.  
Ketidakcapaian terhadap taregt jumlah ukm yang memahami prosedur export sebanyak 20 calon exportir disebabkan karena anggaran APBD 2022 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini tidak dianggarkan di tahun 2022 karena ada penganggarannya di kegiatan APBN akan tetapi dibulan Maret kegiatan dari sumber dana APBN ini mengalami refocusing sehingga target tidak tercapai.



- Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang dari target 1200 kali, capaian 1050 kali hal ini disebabkan terdapat beberapa permohonan pengujian yang tidak dapat dilayani karena peralatan uji (instrumen analisis) yang belum tersedia. Pemanfaatan gedung laboratorium baru yang masih terkendala dengan penyediaan instalasi listrik untuk peralatan pengujian (instrumen analisis kromatografi gas) untuk pengujian minyak goreng dan senyawa hidrokarbon produk pangan, menyebabkan alat analisis ini belum dapat dioperasikan/difungsikan. Disamping itu rusaknya/tidak berfungsinya alat penyimpan daya (UPS) Kromatografi Gas ini ikut mempengaruhi jumlah permintaan pengujian yang terlayani.

### Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

No	Sasaran	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya pertumbuhan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM	
2	Dari Dana APBD	35.719.975.265,-
3	Dari Dana DAK Non Fisik	2.447.683.747,-
<b>Jumlah</b>		<b>38.167.659.012,-</b>

### Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Sasaran Strategis	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Koperasi Sehat	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>331.539.238</b>	<b>331.539.238</b>
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	331.539.238	331.539.238,00
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>378.807.104</b>	<b>404.017.104</b>



	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	378.807.104	404.017.104,00
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>2.625.870.358</b>	<b>2.625.870.358</b>
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.625.870.358	2.625.870.358,00
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>15.974.062.973</b>	<b>17.606.181.924</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.043.901.853	1.039.901.853,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.525.980.406	9.525.980.406,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.001	150.000.001,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.599.993.432	5.106.160.962,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.436.532.120	1.569.482.702,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	217.655.161	214.656.000,00
<b>Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA</b>	<b>1.220.927.275</b>	<b>1.943.329.233</b>



	<b>MIKRO (UMKM)</b>		
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
	Sub Kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	1.220.927.275	1.943.329.233,00
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>318.627.570</b>	<b>318.627.570</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	318.627.570	318.627.570,00
<b>Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>1.183.962.239</b>	<b>8.773.572.239</b>
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
	Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	942.857.048	8.684.927.048,00
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	241.105.191	88.645.191,00



	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>284.130.413</b>	<b>284.130.413</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional	284.130.413	284.130.413,00
<b>Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>1.771.204.350</b>	<b>1.964.447.457</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	934.064.996	1.127.308.103,00
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	445.274.499	445.274.499,00
	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi	273.933.136	273.933.136,00
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	117.931.719	117.931.719,00
<b>Meningkatnya Pertumbuhan IKM</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.962.877.828</b>	<b>3.760.598.076</b>
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	319.052.183	251.852.183,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	602.821.173	876.168.575,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	753.706.733	2.157.566.939,00
	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	287.297.739	475.010.379,00



	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>155.345.400</b>	<b>155.345.400</b>
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	155.345.400	155.345.400,00
	<b>J U M L A H</b>	<b>26.207.354.748</b>	<b>38.167.659.012</b>

#### D. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2021, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag dalam menunjang pembangunan daerah dibidang koperasi UKM perindustrian dan perdagangan dengan membangun beberapa sistem informasi.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana pembangunan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi.

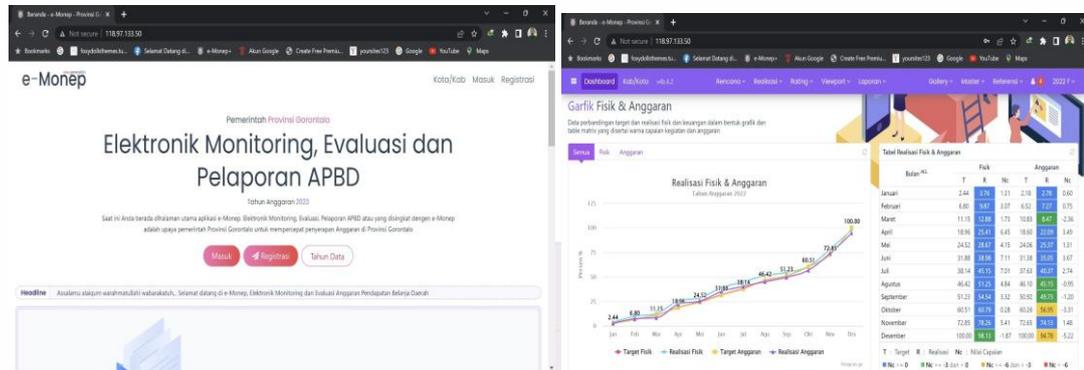
##### 1. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan berisi Monev APBD, dengan alamat akses <https://e-monep.gorontaloprov.go.id>. Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan



**Pemerintah Provinsi Gorontalo  
Dinas KUMPERINDAG**

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;

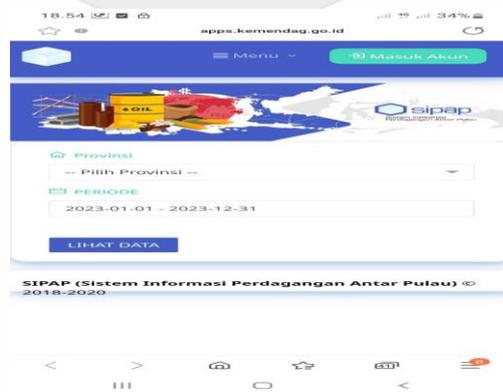


Gambar 2.1. Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo

Aplikasi e-monev bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo digunakan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas-Mu pembangunan dibidang koperasi UKM perindustrian dan perdagangan untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan dan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan

2. Aplikasi SIPAP

Sipap (sistem informasi perdagangan antar pulau) merupakan salah satu aplikasi dalam mendukung program stabilisasi harga serta upaya keterjangkauan akses informasi terkait data distribusi komoditi barang antar wilayah/provinsi. Tujuan dari aplikasi sipap : mengetahui pola distribusi komoditas suatu daerah baik secara bulanan maupun tahunan, menjaga keseimbangan (surplus dan minus) kebutuhan daerah, dan mengetahui potensi perdagangan di daerah. Penggunaan aplikasi sipap ini dimulai dari tahun 2019. Link aplikasi sipap: <https://sipap.kemendag.go.id/>



Gambar 2.2. Aplikasi SIPAP



### 3. APLIKASI SIKP

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yaitu Sistem yang digunakan untuk menampung data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa data calon debitur, akad kredit (debitur), dan transaksi pembayaran/ angsuran KUR yang bisa di akses Pemerintah Daerah dan Pihak lain yang ditentukan oleh Komite Kebijakan. Dinas/ pemerintah daerah bisa mengunggah data calon debitur Dan sebagai acuan kebijakan terkait pemberdayaan UMKM

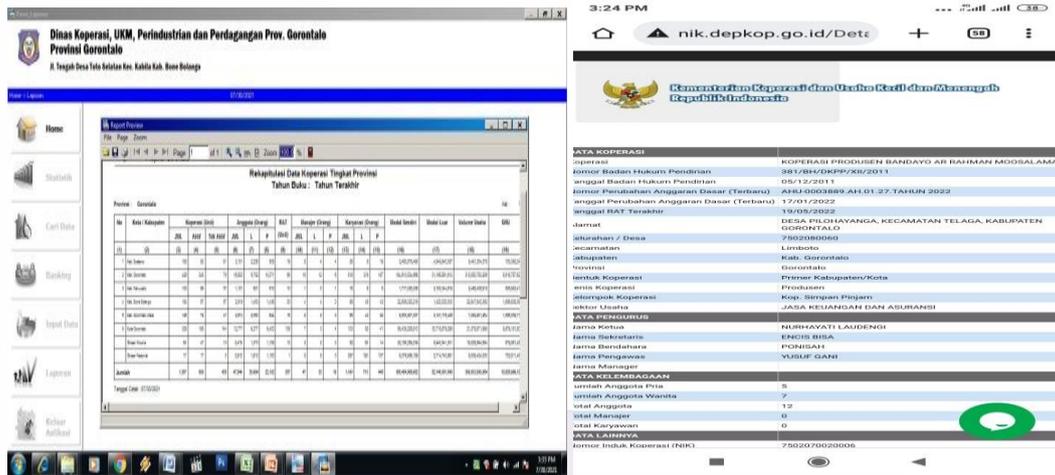
The screenshot shows the SIKP application interface. The main content is a table titled 'Rekap Calon dan Penyaluran' (Summary of Applicants and Disbursement). The table has columns for 'No', 'Kode Pemda', 'Nama Pemda', 'Jumlah Calon Debitur', 'Total Rencana Kredit', 'Jumlah Debitur', and 'Total Nilai Akad'. The data is as follows:

No	Kode Pemda	Nama Pemda	Jumlah Calon Debitur	Total Rencana Kredit	Jumlah Debitur	Total Nilai Akad
1	7501	Kab. Gorontalo	110	953.000.000	0	0
2	7502	Kab. Gorontalo	3.062	10.000.015	604	17.679.345.000
3	7503	Kab. Bonebolango	1.031	5.925.950.000	309	7.589.600.000
4	7504	Kab. Pohuwato	101	1.000.000	44	736.000.000
5	7505	Kab. Gorontalo Utara	43	10.000.000	12	141.000.000
6	7571	Kota Gorontalo	1.582	23.561.500.000	465	6.973.000.000
Total			8.937	30.476.000.015	1.404	39.118.948.000

Gambar 2.3. Aplikasi SIKP

### 4. Online Data System (ODS)

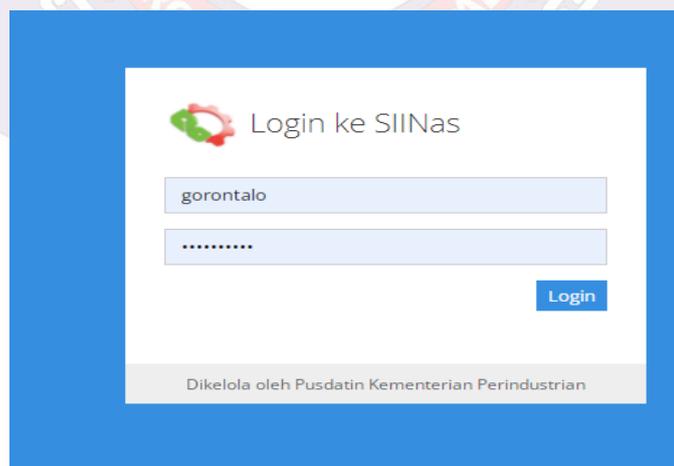
Online Data Sistem (ODS) Koperasi adalah sistem aplikasi pendataan Koperasi yang dapat diakses secara online oleh para pihak yang berkepentingan yang ada pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi KUKM diselenggarakan oleh Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Aplikasi ODS ini telah digunakan sejak tahun 2010 untuk mendukung data agregat. Data ODS Koperasi secara individu meliputi data sebagai berikut :Nama Koperasi, b. Nomor & Tanggal Badan Hukum, Alamat tempat kedudukan, Identitas Koperasi (Jenis & Kelompok), Sektor usaha koperasi, Data Kepengurusan, data Peningkatan & Kesehatan Koperasi, Data Indikator Keuangan, Data Indikator kelembagaan.



Gambar 2.4. Aplikasi Online Data System

### 5. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan sistem informasi terpadu yang berisi data dan informasi tentang industri nasional. Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi, dalam rangka untuk menerapkan kebijakan pengembangan industri yang baik dan efektif yang didukung data yang valid dan up to date. Up dating data pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) wajib dilakukan oleh masing-masing industri. Data ke SIINas, yang berisi antara lain: kapasitas terpasang, mesin yang digunakan, kebutuhan bahan baku, penggunaan energi, penggunaan air baku, pengolahan limbah dan sebagainya.



Gambar 2.5. Aplikasi SIINas



**Pemerintah Provinsi Gorontalo**  
**Dinas KUMPERINDAG**

Untuk mendapatkan Akun, perusahaan harus melakukan :  
registrasi di Website SIINas yang beralamat [sinas.kemenperin.go.id](http://sinas.kemenperin.go.id) proses ini hanya dilakukan satu kali saja. Secara garis besar proses pendaftaran akun terbagi atas empat tahap, sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi secara online melalui website SIINas
2. Menyiapkan dokumen asli
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - b. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Tetap (bagi perusahaan industri);
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (jika ada),
  - d. Tanda Daftar Perusahaan,
  - e. Angka Pengenal Importir Produsen/Umum (jika ada).
  - f. Surat Kuasa dari perusahaan yang dibubuhi materai.
3. Membawa dokumen asli untuk di validasi pada unit pelayanan public



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan, selanjutnya dari hasil pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tertera pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Skala Penilaian Capaian Kinerja

No	KARITERIA	INTERVAL REALISASI (%)	KODE
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat Rendah	(= 50	Merah

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



## 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan peran sektor koperasi UKM industri dan perdagangan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Nilai Tukar Petani (%)	106,40	103,63	97,39	
2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,01	4,04	100,75	
		Laju Inflasi (%)	3,30	5,15	43,93	

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 3 (tiga) indikator tujuan strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2022, indikator tujuan strategis tersebut terdiri atas :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 4,04%. dari target yang ditetapkan 4,01%.

b. Laju Inflasi

Target yang ditetapkan sebesar 3,30% dengan realisasi sebesar 5,15% dengan tingkat capaian sebesar 43,93 %

c. Nilai Tukar Petani

adapun realisasi nilai tukar petani sebesar 103,63% dari target yang ditetapkan sebesar 106,40% sehingga tingkat capaian di tahun 2022 sebesar 97,39%

Pencapaian tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Dinas



Kumperindag Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3. Tingkat Pencapaian sasaran Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat (%)	10%	34,38%	343,8%	
2	Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	50 ukm	60 ukm	132	
3	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	50 IKM	212 IKM	424	
4	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	2.15%	0.19%	8,84%	
5	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	

Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo memiliki 5 (lima) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.

a. Persentase Koperasi Sehat

Capaian indicator koperasi sehat sebesar 343,8% , dari target 10% dan realisasi 34,38%.

Persentase Koperasi sehat di tahun 2022 dihitung berdasarkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT tahun buku 2022 sebanyak 252 koperasi dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT sebanyak 733 koperasi (dimana jumlah koperasi aktif tahun 2022 sebanyak 985 koperasi) dikali 100 persen

b. Rata-Rata UKM Naik Kelas

adapun target ukm naik kelas tahun 2022 sebesar 50 UKM dnegan realisasi sebesar 60 UKM. Sehingga capaian rata-rata UKM naik kelas sebesar 132%.



Rata-Rata UKM Naik Kelas dihitung berdasarkan total UKM naik kelas tahun 2022 sebanyak 330 UKM naik kelas dibagi dengan tahun n (tahun ke 5).

c. Jumlah Penumbuhan IKM

Jumlah penumbuhan IKM ditahun 2022 sebesar 212 IKM dari target 50 IKM di tahun 2022. Sehingga capaian sebesar 424%

“jumlah penumbuhan IKM” Tahun 2022 diperoleh dari jumlah IKM tahun n (2022) sebanyak 15.767 IKM dikurangi dengan jumlah IKM tahun (n-1) yaitu tahun 2021 sebanyak 15.555 IKM. untuk penumbuhan IKM di tahun 2022 sebanyak 212 IKM telah tercapai dengan dukungan sumber dana APBD.

d. Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Di tahun 2022 capaian sebesar 8,84%. Adapun target tahun 2022 sebesar 2,15% dan realisasi 0,19% .

Laju inflasi harga terhadap kemampuan daya beli masyarakat diperoleh dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,15%. (*gorontalo.bps.go.id*)

e. Persentase Barang Beredar sesuai Ketentuan

Di tahun 2022 capaian sebesar 100%. Dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Untuk persentase barang beredar sesuai ketentuan diperoleh dari total hasil temuan yang ditindaklanjuti sebesar 91 temuan dibagi dengan total temuan yang terjadi sebesar 91 temuan di tahun 2022

**2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Yang Lalu**

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita serta pertumbuhan export dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Lalu

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Nilai Tukar Petani (%)	100,69	99,83	98.65	97.29	97,39



Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	90,39	89,01	-0,47	40,37	100,75
	Laju Inflasi (%)	56,58	78,2	22,88	75,73	43,94

- Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian dari indikator kinerja nilai tukar tani pada tahun 2022 sebesar 97,39% mengalami kenaikan sebesar 0,1% dibanding tahun 2021. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 ,pencapaian NTP ditahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 1,27% begitupun terhadap tahun 2019 maupun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,4% hingga 3,3%.
- Untuk Indikator Pertumbuhan Ekonomi, ditahun 2022 capaian kinerja sebesar 100,75% mengalami kenaikan sebesar 149,6% dibanding tahun 2021. Begitupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan 11,46% terhadap tahun 2018, 13,2% ditahun 2019.
- Capaian Laju Inflasi ditahun 2022 sebesar 43,93%. Capaian ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya turun sebesar 41,98% tahun 2021, begitupun jika dibandingkan dengan tahun 2018 hingga 202 mengalami kenaikan 43,8 hingga 22,34%

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, maka didukung pula oleh tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yaitu peningkatan pemberdayaan koperasi dan UKM, Peningkatan peran IKM dalam perekonomian daerah, dan peningkatan kontribusi sektor perdagangan.

Dari tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tersebut maka untuk pencapaian sasaran strategis maka didukung oleh capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Daya Saing & Koperasi & UMKM	Koperasi Berkualitas	6 Koperasi	6 Koperasi			
	UMKM Naik Kelas	60 UKM	70 UKM			
Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat			333,8%	300,3%	343,8%
Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas			120%	128%	132%



Meningkatnya Produksi IKM	~ IKM Yang Bersertifikat	25 IKM	44 IKM			
	~ Nilai Produksi IKM (Rp)	610.359.633	767.899.395			
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM			452%	658%	424%
Meningkatnya Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri & Meningkatkan Akses Pasar Luar Negeri	~ Perdagangan Antar Pulau	3033 Kali	3308 Kali			
	~ Ekspor Komoditi Unggulan Daerah	19 Kali Ekspor	342 kali ekspor			
Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat			57,21%	18,14%	8,84%
Meningkatnya Perlindungan Konsumen & Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan			125%	108,84%	100%

Untuk sasaran strategis dinas Kumperindag di tahun 2018 hingga 2019 masih mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2017-2022. Kemudian untuk 2020 hingga 2022 akan mengacu pada renstra revisi berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Berdasarkan tabel tersebut di atas capaian dari 6 (enam) indikator kinerja dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut :

a. Persentase Koperasi Sehat

Capaian indikator ini adalah sebesar 343,8% di tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 14,48% dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2,9% dibandingkan tahun 2020

Untuk tahun 2018 hingga 2019 masih mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis dinas yang terdapat pada Renstra sebelu revisi. Dimana indikatornya adalah jumlah koperasi berkualitas dengan capaian 6 koperasi di tahun 2019 dan 2018.

b. Rata-Rata UKM Naik Kelas

Capaian indikator rata-rata UKM Naik kelas ditahun 2022 sebesar 132% (Realisasi 75 UKM) mengalami kenaikan sebesar 3,13% dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (realisasi 75 UKM) dan 10 % dibandingkan tahun 2020.



Untuk capaian di tahun 2018 dan 2019 masih mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis dinas yang terdapat pada Renstra sebelum revisi yaitu UMKM Naik kelas.

c. Jumlah Penumbuhan IKM

untuk capaian indikator kinerja di tahun 2022 sebesar 424% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 35,56% dan 6,19% di tahun 2020. Ditahun 2018-2019 indikator kinerja sasaran strategis pada renstra sebelum revisi adalah .25 IKM di tahun 2018 , naik menjadi 44 IKM di tahun 2019 dengan indikatornya adalah jumlah IKM yang bersertifikat. Dan untuk indicator nilai produksi IKM ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 20% .

d. Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Capaian indikator ini ditahun 2022 sebesar 8,84% menurun 51,27% dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 18,14% dan 84,55% di tahun 2020. Untuk tahun 2018 dan 2019 indikator sasaran strategis masih mengacu pada renstra sebelum revisi yaitu jumlah perdagangan antar pulau sebesar 3308 kali ditahun 2019 dan 3033 kali di tahun 2018, mengalami kenaikan sebesar 8,3% ditahun 2019. Kemudian indicator sasaran strategis berikutnya yaitu ekspor komoditi unggulan daerah ditahun 2018 capaiannya yaitu 19 kali export dan di tahun 2019 sebesar 342 kali export.

e. Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan

capaian indikator di tahun 2022 sebesar 100% mengalami penurunan 8,12% dibandingkan tahun 2021 dengan realisasi 108,84%. Indikator sasaran strategis ini mengacu pada Renstra Revisi.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari beberapa indikator kinerja dibandingkan dengan target RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:



Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPJMD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi sampai dengan Tahun 2022	Capaian (%)	Kriteria/Kode
Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Nilai Tukar Petani	106,40	103,63	97,39	
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	4,01	4,04	100,75	
	Laju Inflasi (%)	2 - 3	5,15	43,93	

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

a. Nilai Tukar Petani

Capaian dari indikator kinerja Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 ini capaian kerjanya sebesar 97,39% dengan kriteria sangat baik.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Capaian dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 ini capaian kerjanya sebesar 100,75% dengan kriteria sangat baik.

c. Laju Inflasi

Target indikator laju inflasi Provinsi Gorontalo pada RPJMD adalah sebesar 3,30% dengan realisasinya sebesar 5,15% dan capaian 43,93%

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Kumperindag maka didukung juga oleh capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yaitu 5 (lima) indikator kinerja yang akan dibandingkan dengan target Renstra. Hal dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini:



Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

No	Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
						/Kode
1	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	10%	34,38	343,8	
2	Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	50 UKM	65	132	
3	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	50	212	424 %	
4	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	2,15%	0,19%	8,84%	
5	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut adalah :

a. Persentase Koperasi Sehat

capaian indikator sasaran strategis di tahun 2022 ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sebanyak 343,8%. Dari target 10% dan realisasi 10%.

Persentase Koperasi sehat di tahun 2022 dihitung berdasarkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT tahun buku 2022 sebanyak 252 koperasi dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT sebanyak 733 koperasi (dimana jumlah koperasi aktif tahun 2022 sebanyak 985 koperasi) dikali 100 persen

b. Rata-Rata UKM Naik Kelas

Capaian untuk rata-rata UKM Naik Kelas tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan 132%. dari target yang ditetapkan 50 UKM dan realisasi 66 UKM. Rata-Rata UKM Naik Kelas dihitung berdasarkan total UKM naik kelas tahun 2022 sebanyak 330 UKM naik kelas dibagi dengan tahun n (tahun ke 5).

c. Jumlah Penumbuhan IKM

Capaian untuk jumlah penumbuhan IKM sebesar 424%. Dari realisasi 329 IKM dan target 50 IKM



d. Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Laju inflasi harga terhadap kemampuan daya beli masyarakat diperoleh dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,15%. (*gorontalo.bps.go.id*)

e. Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan

Di tahun 2022 capaian sebesar 100%. Dari target yang ditetapkan dalam renstra yaitu sebesar 100%.

Untuk persentase barang beredar sesuai ketentuan diperoleh dari total hasil temuan yang ditindaklanjuti sebesar 91 temuan dibagi dengan total temuan yang terjadi sebesar 91 temuan di tahun 2022

#### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dan indicator kinerja lainnya dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Pemprov Gorontalo	Standar Nasional (%)	Capaian (%)	Kriteria/Kode
Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Nilai Tukar Petani	103,63	109	105,18	
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	4,04	5,31	131,44	
	Laju Inflasi (%)	5,15	5,51	93	

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk capaian masing-masing indicator kinerja sebagai berikut :

a. Nilai Tukar Petani

Capaian dari indicator kinerja Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2022 ini capaian kinerjanya sebesar 105.18% dengan kriteria sangat tinggi yaitu realisasinya 103,63% Pada bulan Desember 2022 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah tangga (IKRT)



di Gorontalo sebesar 1,72% yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Nilai tukar petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani.

**b. Pertumbuhan Ekonomi**

Capaian dari indicator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2022 ini capaian kinerjanya sebesar 131,44% dengan kriteria tinggi.

Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori jasa perusahaan sebesar 9,93%, yaitu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 6,95% dan terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 19,87 persen.

**c. Laju Inflasi**

Capaian dari indicator kinerja laju inflasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2022 ini capaian kinerjanya sebesar 93% dengan kriteria sangat tinggi yaitu realisasi 5,15% dan standar nasional 5,51%

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Kumperindag maka didukung oleh capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dari 5 (lima) indikator kinerja. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu realisasi kinerja sasaran strategis jika dibandingkan dengan standar nasional.

**Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2022 dengan Standar Nasional**

<b>No</b>	<b>Tujuan strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Kinerja OPD</b>	<b>Standar Nasional (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	34,38 %	30%	87,26
2	Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	66 UKM	19.000.000 UKM	0,00035



3	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	212 IKM	4.400.000 unit	0,0048
4	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	0,19%	5,51%	3,45
5	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan	100%	56%	178,57%

a. Persentase Koperasi Sehat

Capaian dari indikator kinerja ini dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2021 ini capaian kinerjanya mencapai 87,26% . dimana kinerja OPD sebesar 34,38% dan target nasional pada Kemenkopukm sebanyak 30% ditahun 2022.

b. Rata-Rata UKM Naik Kelas

Indikator rata-rata UKM naik kelas untuk realisasi Dinas Kumperindag tahun 2022 sebesar 66 UKM. Berdasarkan standar nasional jumlah ukm naik kelas sebesar 19.000.000 UKM.

c. Jumlah Penumbuhan IKM

Jumlah penumbuhan IKM di Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 212 IKM, Sepanjang tahun 2022, jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) mencapai 4,4 juta unit usaha atau sebagai mayoritas 99,7% dari total unit usaha industri di Indonesia

sektor IKM telah menyerap tenaga kerja hingga 12,39 juta orang atau 66,25% dari total tenaga kerja di sektor industri. Sektor IKM juga telah berkontribusi sebesar 21,37% dari total nilai output industri pengolahan,

Sampai triwulan III tahun 2022, telah ditaih sebanyak 17.763 wirausaha baru, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 8.019 wirausaha baru.

d. Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Laju inflasi harga terhadap kemampuan daya beli di Provinsi Gorontalo sebesar 0,19%. Lebih rendah dari tingkat inflasi di Indonesia yang sebesar 5,51%. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami inflasi 5,51% sepanjang 2022. Angka ini menjadi rekor inflasi tertinggi dalam 8 tahun terakhir. inflasi tertinggi sepanjang 2022 terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, yakni 15,26% dengan andil 1,84%



- e. Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan  
Capaian indicator ini di Provinsi Gorontalo sebesar 100%, dan capaian Kemendag sebesar 56%

## 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan indicator kinerja Nilai Tukar Petani

adapun realisasi nilai tukar petani sebesar 103,63% dari target yang ditetapkan sebesar 106,40% sehingga tingkat capaian di tahun 2022 sebesar 97,39%. Pencapaian dari indicator kinerja nilai tukar petani pada tahun 2022 ini yang sebesar 97,39% mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020, pencapaian NTP ditahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 1,27% begitupun terhadap tahun 2019 maupun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,4% hingga 3,3%.

Capaian dari indicator kinerja Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 ini capaian kinerjanya sebesar 97.39% dengan kriteria sangat baik.

Capaian dari indicator kinerja Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2022 ini capaian kinerjanya sebesar 105.18% dengan kriteria sangat tinggi yaitu realisasinya 103,63%.

Pada bulan Desember 2022 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah tangga (IKRT) di Gorontalo sebesar 1,72% yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Nilai tukar petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani

Pengendalian terhadap NTP setidaknya perlu dilakukan dari dua sisi yaitu dari sisi harga produk pertanian dan dari sisi harga barang konsumsi petani. Dari sisi harga produk pertanian hal yang dilakukan dengan pengendalian anjlok harga utamanya melalui Bulog dan Kemendag. Kelancaran distribusi barang



harus terkondisikan secara riil dilapangan sehingga mampu mengurangi biaya distribusi dan selisih harga di tingkat konsumen dan di tingkat petani.

**b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan indicator kinerja Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 4,04%, dari target yang ditetapkan 4,01%. Untuk Indikator Tujuan Pertumbuhan Ekonomi, ditahun 2022 capaian kinerja sebesar 100,75% mengalami kenaikan sebesar 149,6% dibanding tahun 2021. Begitupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan 11,46% terhadap tahun 2018 dan 13,2% ditahun 2019. Adapun capaian dari indicator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 ini capaian kerjanya sebesar 100,75% dengan kriteria sangat baik.

Capaian dari indicator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2022 ini capaian kerjanya sebesar 131,44% dengan kriteria tinggi.

Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori jasa perusahaan sebesar 9,93%, yaitu dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 6,95% dan terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 19,87 persen.

Secara kumulatif kinerja dari triwulan I sampai triwulan IV/2022, pertumbuhan ekonomi Gorontalo *c to c* sebesar 4,04%, dibanding pertumbuhan ekonomo kumulatif di tahun 2021.

Solusi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk sarana dan prasarana kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, stimulus bagi UMKM, hingga percepatan penyerapan anggaran untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Upaya ini dilakukan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta menggerakkan roda ekonomi di daerah. "Pemprov Gorontalo juga terus mendorong investasi untuk mengelola potensi daerah di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan nasional.



c. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator kinerja Laju Inflasi**

Target yang ditetapkan sebesar 3,30% dengan realisasi sebesar 5,15% dengan tingkat capaian sebesar 43,93 % .

Capaian Laju Inflasi ditahun 2022 sebesar 43,93%. Capaian ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ditahun 2021 turun sebesar 41,08%. Begitupun jika dibandingkan dengan tahun 2018 hingga 2020 mengalami kenaikan dari 43,8% hingga 22,34%

Target indikator laju inflasi Provinsi Gorontalo pada RPJMD adalah sebesar 3,30% dengan realisasinya sebesar 5,15% dan capaian 43,93%.

Capaian dari indicator kinerja Laju Inflasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2022 ini capaian kinerjanya sebesar 93% dengan kriteria sangat tinggi yaitu realisasi 5,15% dan standar nasional 5,51% Inflasi terjadi karna adanya kenaikan harga yang ditunjukan olh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minumam dan tembakau.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah provinsi Gorontalo dalam menekan Inflasi yaitu adanya komitmen dari pemerintah daerah yang terlihat intensitas kehadiran pejabat gubernur dalam setiap *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pelaksanaan operasi pasar murah yang mendorong empati dan komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan Pemprov Gorontalo melakukan launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Gorontalo secara cepat pada 13 Agustus 2022 setelah launching GNPIP di Malang 10 Agustus 2022. Pemprov Gorontalo juga menanggapi serius hasil kesepakatan HLM TPID, dengan menerbitkan SE Gubernur No.500/BP/Ekbang/793/VII/2022, untuk pelaksanaan urban farming kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pengendalian inflasi. Selanjutnya, mensinergikan program vaksinasi dengan memberikan bantuan berupa beras



**d. Meningkatnya Koperasi Sehat dengan indicator kinerja Persentase Koperasi Sehat**

Capaian indicator koperasi sehat sebesar 343,8% , dari target 10% dan realisasi 34,38%. Persentase Koperasi sehat di tahun 2022 dihitung berdasarkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT tahun buku 2022 sebanyak 252 koperasi dibagi dengan Jumlah seluruh koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT sebanyak 733 koperasi (dimana jumlah koperasi aktif tahun 2022 sebanyak 985 koperasi) dikali 100 persen.

Capaian indicator ini adalah sebesar 343,8% di tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 14,48% dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2,9% dibandingkan tahun 2020.

Untuk tahun 2018 hingga 2019 masih mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis dinas yang terdapat pada Renstra sebelum revisi. Dimana indikatornya adalah jumlah koperasi berkualitas dengan capaian 6 koperasi di tahun 2019 dan 2018.

capaian indicator sasaran strategis di tahun 2022 ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sebanyak 343,8%. Dari target renstra 10% dan realisasi 10%.

Capaian dari indicator kinerja ini dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2022 ini capaian kinerjanya mencapai 87,26% . dimana kinerja OPD sebesar 34,38% dan target nasional pada Kemenkopukm sebanyak 30% ditahun 2022.

Solusi yang dilakukan adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi dan bedah koperasi untuk meningkatkan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT.

**e. Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas dengan indicator kinerja Rata-Rata UKM Naik Kelas**

Adapun target ukm naik kelas tahun 2022 sebesar 50 UKM dengan realisasi sebesar 60 UKM. Sehingga capaian rata-rata UKM naik kelas sebesar 132%.

Rata-Rata UKM Naik Kelas dihitung berdasarkan total UKM naik kelas tahun 2022 sebanyak 330 UKM naik kelas dibagi dengan tahun n (tahun ke 5). Capaian indikator rata-rata UKM Naik kelas ditahun 2022 sebesar 132% (Realisasi 75 UKM) mengalami kenaikan sebesar 3,13% dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (realisasi 75 UKM) dan 105 di tahun 2020. Untuk capaian



di tahun 2018 dan 2019 masih mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis dinas yang terdapat pada Renstra sebelum revisi yaitu UMKM Naik kelas.

Untuk capaian indicator ini jika dibandingkan dengan capaian pada renstra yaitu Capaian untuk rata-rata UKM Naik Kelas tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan 132%. dari target Renstra yang ditetapkan 50 UKM dan realisasi 66 UKM.

Capaian dari indicator kinerja ini dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2022 ini sebesar 0,00035%. Yaitu capaian OPD 66 UKM naik kelas 2022 dan capaian nasional yaitu pada kementerian Kemenkop UKM sebesar 19.000.000 UMKM naik kelas di Indonesia. UKM ini sudah berjualan di platform digital.

Target yang diharapkan dapat tercapai dengan mengoptimalkan kegiatan pembinaan kepada UKM, kegiatan-kegiatan yang menyentuh kepada peningkatan pendapatan, pengetahuan dan keterampilan UKM melalui bisnis class dan mengoptimalkan peran pendamping UKM untuk memacu perkembangan UKM serta stimulus bagi pelaku usaha UKM

f. **Meningkatnya Pertumbuhan IKM dengan indicator kinerja Jumlah Penumbuhan IKM**

Jumlah penumbuhan IKM ditahun 2022 sebesar 212 IKM dari target 50 IKM di tahun 2022. Sehingga capaian sebesar 424%

“jumlah penumbuhan IKM” Tahun 2022 diperoleh dari jumlah IKM tahun n (2022) sebanyak 15.767 IKM dikurangi dengan jumlah IKM tahun (n-1) yaitu tahun 2021 sebanyak 15.555 IKM. untuk penumbuhan IKM di tahun 2022 sebanyak 212 IKM telah tercapai dengan dukungan sumber dana APBD. untuk capaian indikator kinerja di tahun 2022 sebesar 424% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 35,56%. Ditahun 2018-2019 indikator kinerja sasaran strategis pada renstra sebelum revisi adalah 25 IKM di tahun 2018, naik menjadi 44 IKM di tahun 2019 dengan indikatornya adalah jumlah IKM yang bersertifikat. Dan untuk indicator nilai produksi IKM ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 20%

Adapun indicator kinerja ini jika dibandingkan dengan target pada renstra yaitu sebesar 424%, dari realisasi 329 IKM dan target 50 IKM. Jumlah penumbuhan IKM di Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 212 IKM,



Jumlah penumbuhan IKM di Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 212 IKM, Sepanjang tahun 2022, jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) mencapai 4,4 juta unit usaha atau sebagai mayoritas 99,7% dari total unit usaha industri di Indonesia. sektor IKM telah menyerap tenaga kerja hingga 12,39 juta orang atau 66,25% dari total tenaga kerja di sektor industri. Sektor IKM juga telah berkontribusi sebesar 21,37% dari total nilai output industri pengolahan, Sampai triwulan III tahun 2022, telah ditaih sebanyak 17.763 wirausaha baru, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 8.019 wirausaha baru

Pencapaian diharapkan dapat terus bertahan dengan terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan, pengawasan serta bantuan barang yang diserahkan kepada para IKM antara lain berupa bantuan peralatan, rumah produksi, perizinan.

**g. Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri dengan indicator kinerja Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat**

Di tahun 2022 capaian sebesar 8,84%. Adapun target tahun 2022 sebesar 2,15% dan realisasi 0,19% .

Laju inflasi harga terhadap kemampuan daya beli masyarakat diperoleh dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,15% dan inflasi tahun 2021 sebesar 2,59% .  
(*gorontalo.bps.go.id*)

Capaian indikator ini ditahun 2022 sebesar 8,84% menurun 51,27% dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 18,14% dan tahun 2020 sebesar 84,55%.

Untuk tahun 2018 dan 2019 indikator sasaran strategis masih mengacu pada renstra sebelum revisi yaitu jumlah perdagangan antar pulau sebesar 3308 kali ditahun 2019 dan 3033 kali di tahun 2018, mengalami kenaikan sebesar 8,3% ditahun 2019.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 capaian untuk indikator sasaran strategis ini 100%. Laju inflasi harga terhadap kemampuan daya beli masyarakat diperoleh dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,15%.  
(*gorontalo.bps.go.id*)

Laju inflasi harga terhadap kemampuan daya beli di Provinsi Gorontalo sebesar 0,19%. Lebih rendah dari tingkat inflasi di Indonesia yang sebesar



5,51%. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami inflasi 5,51% sepanjang 2022. Angka ini menjadi rekor inflasi tertinggi dalam 8 tahun terakhir. inflasi tertinggi sepanjang 2022 terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, yakni 15,26% dengan andil 1,84%

Upaya yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap distribusi barang/jasa dan menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya melalui kegiatan operasi pasar dan pengawasan barang beredar.

**h. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan dengan indicator kinerja Persentase Barang Beredar sesuai Ketentuan.**

Di tahun 2022 capaian sebesar 100%. Dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Untuk persentase barang beredar sesuai ketentuan diperoleh dari total hasil temuan yang ditindaklanjuti sebesar 91 temuan dibagi dengan total temuan yang terjadi sebesar 91 temuan di tahun 2022

capaian indikator di tahun 2022 sebesar 100% mengalami penurunan 8,12% dibandingkan tahun 2021 dengan realisasi 108,84%. Indikator sasaran strategis ini mengacu pada Renstra Revisi.

Tahun 2022 capaian untuk indicator sasaran strategis ini 100% dan capaian nasional sebesar 56%. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target ini yaitu melakukan pengawasan barang dan jasa secara kontinyu dan semaksimal mungkin.

**6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumberdaya biaya dan sumberdaya manusia. Pada Tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp **36.173.738.155,-** sementara target biaya Dinas Kumperindag tahun 2022 yaitu Rp **38.167.659.012,-** atau sebesar 94,78 %. Dengan demikian capaian tingkat efisiensi sebesar 3.86%.

Tabel 3.10. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Anggaran Induk	Anggaran*	Realisasi (Rp).	Capaian Output (%)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Koperasi Sehat	19.310.279.673	20.967.608.624	19.777.090.930	98,99	97,94	1,05



Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	1.539.554.845	2.261.956.803	2.251.292.664	100	99,26	0,74
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	2.118.223.228	3.915.943.476	3.688.082.359	100	96,04	3,96
Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	1.468.092.52	9.057.702.652	8.505.103.205	99,28	94,62	4,66
Meningkatnya Perlindungan Konsumen & Pengawasan Perdagangan	1.771.204.350	1.964.447.457	1.952.168.997	100	99,37	0,63
	<b>26.207.354.748</b>	<b>38.167.659.012</b>	<b>36.173.738.155</b>	<b>98,18</b>	<b>94,78</b>	

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya pada 5 (lima) sasaran strategis dinas rata-rata antara 0,63 sampai dengan 3,96 persen.

a. Meningkatkan Koperasi Sehat

Tingkat efisiensi sebesar 1,05%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya manusia. Dalam pencapaian target beberapa sub kegiatan yaitu antara lain jumlah revitalisasi koperasi tidak maksimal karena berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota dan masalah internal dari koperasi yang belum mau disentuh dengan upaya bedah koperasi yang dilakukan sehingga aktifitas ini dialihkan ke kegiatan pembinaan kepada koperasi di Kabupaten/Kota.

b. Meningkatkan Jumlah UKM Naik Kelas

Tingkat efisiensi sebesar 0,74%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya manusia, mengoptimalkan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) , kelas bisnis UMKM untuk pengembangan desa wirausaha, pembinaan UKM Naik kelas (UKM berbasis syariah). Melakukan program pelatihan dan pendampingan dengan berbagai marketplace dan mengupayakan kebijakan afirmasi penggunaan produk lokal dalam pencapaian target.

c. Meningkatkan Pertumbuhan IKM

Efisiensi anggaran sebesar 3,96 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, penyediaan dan peningkatan sarana prasarana yaitu bantuan bahan yang diserahkan kepada pelaku IKM.



Pada target kegiatan Jumlah Industri Agro Terpadu (0) dari target 1 industri agro terpadu belum tercapai karena Rencana untuk membentuk 1 (satu) UPTD Pengembangan Produk dan Kemasan masih menunggu Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri

d. **Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri**

Tingkat efisiensi sebesar 4,66%. Dalam upaya efisiensi penggunaan sumberdaya manusia telah dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah melalui pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan menjelang hari besar keagamaan (HBKN) , saat adanya potensi kenaikan harga komoditi barang kebutuhan pokok dan kegiatan yang terkait pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

c. **Meningkatnya Perlindungan Konsumen & Pengawasan Perdagangan**

Tingkat efisiensi sebesar 0,63 %. Untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, dan mengoptimalkan aparat dalam melakukan pengawasan barang dan jasa serta pengawas perdagangan serta pengawasan barang beredar.

**7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022. Program-program tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan masing-masing yaitu Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Program – program yang telah diselenggarakan sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**

Kegiatan :

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**B. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**

Kegiatan :

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



**C. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**

Kegiatan :

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**D. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

**E. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

**F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

**G. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

**H. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**

Kegiatan :

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

**I. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Kegiatan :

- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota



## URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

### J. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

### K. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional SIINas)

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2022.

Adapun output dari program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

#### ***Sasaran Strategis I : Meningkatnya Koperasi Sehat***

#### **1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat Pagu untuk kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar Rp. 331.539.238,- dengan realisasi sebesar Rp. 330.865.850,-. Dengan silva sebesar Rp. 673.388,- (sisa pada item belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- dan belanja ATK, bahan cetak, makan minum rapat, perjalanan dinas biasa dan dalam kota)

*Outcome* dari program ini adalah jumlah dokumen laporan hasil pengawasan 7 dokumen, jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk dan dilatih sebanyak 1 satgas (provinsi), jumlah koperasi berkualitas/koperasi berprestasi 20 koperasi.

*Output Kegiatan* ini adalah :

- a. Rakor Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dilaksanakan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo dengan peserta Pembina Koperasi dan Pejabat Fungsional Pengawasan Koperasi Se-Provinsi Gorontalo berjumlah 30 Orang.



- b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Primer Provinsi Gorontalo dan pengawasan/monev koperasi penerima bantuan/penghargaan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kabupaten/Kota serta pemeriksaan KSP/USP dilakukan pada 12 Koperasi Primer Provinsi Gorontalo
- c. Rapat Ekspose Hasil Pengawasan Koperasi yang menghasilkan laporan hasil pengawasan koperasi Se-Provinsi Gorontalo baik yang didanai APBD dan APBN (Satgas Pengawas Koperasi Se-Provinsi Gorontalo) sebanyak 42 laporan.
- d. Penilaian Koperasi Berprestasi, yang menghasilkan 20 koperasi berprestasi Se-Provinsi Gorontalo dan sebagai penerima penghargaan koperasi berprestasi

**Tabel 3.11**  
**Daftar Koperasi Berprestasi Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2022**

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1	KOPERASI KONSUMEN "WANITA KASIH IBU"	Jl. Madura Kel. Dulalowo Kota Gorontalo
2	KSU "CITRA JAYA"	Kel. Tenda Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
3	KOPERASI KARYAWAN "QUALITY SEJAHTERA"	Jl. Prof. Dr. HB Jassin Kota Gorontalo
4	KOPERASI KONSUMEN "WINDU JAYA MANDIRI"	Desa Mootinelo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara
5	KPRI "PENGAYOMAN PEGAWAI DEP. KEHAKIMAN"(KPPDK) (KPPDK) GORONTALO	Kel. Donggala Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo
6	KSU "BHAKTI JAYA"	Kec. Limboto Kab. Gorontalo
7	KSU "TIRTA MALEO"	Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato
8	KSU "TIRTA LIMUTU"	Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo
9	KPRI "BERINGIN"	Jl. Sawah Besar Desa Oluhuta Kab. Bone Bolango
10	KOPERASI WANITA "ANNUR"	Desa Karya Indah Kec. Asparaga Kab. Gorontalo
11	KOPERASI KONSUMEN "TRI PUTRA GUSTET"	Desa Hulawa Kec. Paguyaman Kab. Boalemo
12	KOPERASI KARYAWAN	Kec. Tilamuta



	"TIRTA AYUHULALO"	Kab. Boalemo
13	KUD "KESRAT"	Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo
14	KOPERASI USAHA TERNAK "LEMBU KAROMAH"	Desa Pancakarsa I Kec. Taluditi Kab. Pohuwato
15	KSP "HIDUP"	Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Wonggaditi Barat Kota Gorontalo
16	KSP "HEMAT"	Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango
17	KSP "SENTOSA"	Jl. Pasar Minggu Kel. Tingkohubu Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango
18	KSP. "HANDAYANI JAYA"	Kel. Botupingge Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango
19	KSP "MEMBANGUN HIDUP"	Desa Manunggal Karya Kab. Pohuwato
20	KPRI "WIYATA MANDALA"	SMA Tilamunta Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

**Tabel 3.12**  
**Daftar Pemeriksaan Kesehatan KSP/USP**  
**Koperasi Primer Provinsi Gorontalo**  
**Tahun 2022**

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	HASIL
1	KSP AL-HIKMAT PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	Kel. Dulomo Selatan Kota Gorontalo	Sehat
2	KSP KARYA CIPTA DANA	Desa Bulota Kab. Gorontalo	Sehat
3	KSU KARYA PRASETYA	Kel. Limba U 2 Kota Gorontalo	Sehat
4	KPRI WIRA USAHA BARU	Desa Toto Kab. Bone Bolango	Sehat
5	KOP. TRANSPORTASI ANGKASA GORONTALO	Desa Tolotio Kab. Gorontalo	Cukup Sehat
6	KOP. KONS. BERKAT JAYA MANDIRI	Desa Poowo Kab. Bone Bolango	Cukup Sehat
7	KOP. JASA ANGKUTAN KRAWANG JAYA BERSAMA	Kel. Huangobotu Kota Gorontalo	Cukup Sehat



8	KOP. KONS. ANUGERAH DEHETO MANDIRIO	Kel. Bugis Kota Gorontalo	Cukup Sehat
9	KSP TENANT MANDIRI	Kota Tengah Kota Gorontalo	Cukup Sehat
10	KOP. KONSUMEN SYARIAH EL MADANI BAPPEDA GORONTALO	Desa Karya Indah Kec. Asparaga Kab. Gorontalo	Sehat
11	KOP. TINELO HULAWA ABADI	Kel. Tumbihe Kab. Bone Bolango	Cukup Sehat
12	KPRI WIYOWA	Kel. Limba U 2 Kota Gorontalo	Sehat

## 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

*Outcome* Jumlah koperasi & UKM yang mengakses permodalan sebanyak 1500 koperasi

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha berjumlah Rp. 404.017.104,- dengan realisasi hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp. 403.682.324,-. Sisa kegiatan berjumlah Rp. 334.780,- yaitu item belanja yang tidak dapat dibelanjakan lagi yaitu sisa belanja ATK, bahan cetak, alat listrik, makan minum rapat, makan minum aktivitas lapangan serta sisa perjalanan dinas dalam kota Rp. 287.500,-. Adapun realisasi Fisik dari kegiatan 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,92%.

*Output kegiatan* ini adalah :

- a. Forum Koordinasi Akses Pembiayaan tahun 2022, dilaksanakan di 6 Kab/Kota se Provinsi Gorontalo dengan jumlah peserta 90 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi permasalahan terhadap Koperasi dan UKM dalam hal akses pembiayaan serta sebagai media koordinasi dan konsolidasi dengan Pihak Perbankan dan Pegadaian untuk mempercepat realisasi pinjaman melalui Program KUR, LPDB dan UMI.



- b. Pemberian Penghargaan atau hadiah kepada Koperasi Sehat Kepatuhan, yang telah dinilai yang dianggap mampu mengembangkan Koperasi dan telah melaksanakan kewajiban sebagai suatu badan hukum koperasi melalui pelaksanaan RAT Koperasi, dengan total hadiah sebesar Rp.150.000.000,- dengan 15 Koperasi penerima masing-masing koperasi sebesar 10 juta rupiah.
- c. Rapat Koordinasi Permodalan tahun 2022, dilaksanakan di Provinsi Gorontalo sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 60 orang. Kegiatan ini sebagai media koordinasi dan konsolidasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo, Kab/Kota serta Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dengan Pendamping KUKM dalam rangka mencari solusi permasalahan terhadap akses pembiayaan.
- d. Jumlah pelaku usaha yang mengakses kredit usaha rakyat (KUR) dan Progran Ultra Mikro (UMI) berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan RI sebanyak 42.578 dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.276.353.434.079,- dan Outstanding sebesar Rp. 927.825.738.419,-.
- e. Akses Permodalan, Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses Permodalan di tahun 2022 adalah 4867 KUKM berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain dilakukan melalui kegiatan sosialisasi melalui iklan dan penyiaran di media (RRI dan Koran) dengan sumber dana APBD.

Tabel 3.13  
Koperasi Penerima Hadiah Penilaian Koperasi Sehat Kepatuhan Tahun 2022

No	Binaan Kab/Kota/Provinsi Nama Koperasi	Badan Hukum		Alamat
		Nomor	Tanggal	
<b>I KOTA GORONTALO</b>				
1	Koperasi Konsumen Primkoppabri Cahaya Abadi	AHU-0009266.AH.01.26.TAH UN 2021	23/03/2021	Kec. Duingingi Kota Gorontalo
2	Koperasi Serba Usaha Damay	32/BH/XXII.3/12/1/2012	13/01/2012	Kec. Biawao Kota Gorontalo
<b>II KABUPATEN GORONTALO</b>				
1	Koperasi Produsen Bandayo Ar Rahman Moosalamati	381/BH/DKPP/2011	05/12/2011	Kec. Telaga Kab. Gorontalo
<b>II I KABUPATEN BOALEMO</b>				
1	Koperasi Simpan Pinjam	1691/BH/V	30/12/197	Kec.



	Pelita		1	Paguyaman Kab. Boalemo
2	Koperasi Konsumen Fisheris Bahari Mohupomba	30/BH/VIII/2004	18/08/2004	Kec. Tilamuta Kab. Boalemo
<b>I V</b>	<b>KABUPATEN POHUWATO</b>			
1	Koperasi Produsen Salfa Helumo Mandiri	AHU-0010055.AH.01.26.TAH UN 2021	28/04/2021	Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato
2	Koperasi Produsen Sinar Harapan Wanggarasi	010471/BH/M.KUKM.2/XI/2018	12/11/2018	Kec. Wanggarasi Kab. Pohuwato
<b>V</b>	<b>KABUPATEN BONE BOLANGO</b>			
1	Koperasi Produsen Sinar Mustika Laut	001490/BH/M.KUKM.2/VI/2016	15/06/2016	Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango
<b>V I</b>	<b>KABUPATEN GORONTALO UTARA</b>			
1	Koperasi Perikanan Kramat Jaya Hutakalo	194/DISKOP.PKM/2003	31/12/2003	Kec. Sumalata Kab. Gorontalo Utara
2	Koperasi Produsen Agro Wilis Mandiri	010331/BH/M.KUKM.2/X/2018	29/10/2018	Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara
3	Koperasi Produsen KSU Lamahu Jaya	AHU-0004121.AH.01.26.TAHUN 2020	09/07/2020	Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara
<b>V II</b>	<b>PROVINSI GORONTALO</b>			
1	Koperasi Jasa Angkutan Krawang Jaya Bersama	012522/BH/M.KUMK.2/I/2019	28/02/2019	Kec. Duingi Kota Gorontalo
2	Koperasi Simpan Pinjam Tenant Mandiri	29/BH/XXII/III/2014	26/02/2014	Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
3	Koperasi Konsumen Berkat Jaya Mandiri	009273/BH/M.KUKM.2/VIII/2018	09/08/2018	Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
4	Koperasi Konsumen Barokah Provinsi Gorontalo	AHU-0013945.AH.01.26.TAH UN 2021	11/12/2021	Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango

### 3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

*Outcome* dari program ini adalah jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi berkualitas, jumlah koperasi berprestasi..

Ditahun 2022 Jumlah koperasi aktif mencapai 985 koperasi aktif dari target 728 koperasi dan Jumlah Koperasi berprestasi berjumlah 20 Koperasi dari target 10 koperasi.



Keluaran Sub Kegiatan jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan serta jumlah revitalisasi koperasi

Dukungan anggaran tahun 2022 untuk pelaksanaan program kegiatan ini berjumlah Rp. 2.625.870.358,- dengan realisasi mencapai Rp. 2.588.426.886,- atau 98,57% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik. Pada program ini terdapat 2 sumber dana yaitu APBD dan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM sebesar Rp.2.452.964.000,-

Pelaksanaan Program :

**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

*Output kegiatan* ini adalah :

Kegiatan Pembinaan dan Bedah Koperasi yang di ikuti 30 anggota koperasi kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, Oktober dan November tahun 2022

- a. Kegiatan FGD Peningkatan Kualitas SDM dan Penataan Kelembagaan Koperasi yang di ikuti 150 orang yang dilaksanakan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada bulan November tahun 2022
- b. Revitalisasi Koperasi (Bedah Koperasi)

Di tahun 2022 revitalisasi koperasi berjumlah 6 (enam) koperasi yaitu

- Kopwan Ilomata Desa ilomata Kecamatan Atinggola. Kab. Gorontalo Utarakan
- Koperasi Produsen Bandayo Ar-Rahman Moosalamati, ds. pilohayanga. Kec. Telaga. Kabupaten Gorontalo
- Koperasi Pertanian Motongolito, Kecamatan Bongomeme. Kab. Gorontalo
- Koperasi Produsen Puncak Nawacita, Desa Lito. Kec. Paguyaman Pantai. Kab. Boalemo
- Koperasi Makmur Bersama Kapet, desa Harapan. Kec. Wonosari. Kab. Boalemo
- Koperasi Produsen Simanagi Cahaya Abadi, Desa Siduwonge. Kec. Randangan. Kabupaten Pohuwato.

- c. Kegiatan Pembinaan kepada Pengurus, Pengawas Koperasi serta Koperasi pengelola dan anggota Koperasi dilaksanakan di Kabupaten/Kota yaitu :



**Pemerintah Provinsi Gorontalo  
Dinas KUMPERINDAG**

Kabupaten Gorontalo Utara :

- ~ Koperasi Perikanan Kramat Jaya Hutakalo, Desa Hutakalo Kec. Sumalata
- ~ Koperasi Papualangi Expres, Desa Papualangi Kec. Tolinggula

Kota Gorontalo :

- ~ Koperasi Produsen Berkah Mandiri Hulonthalo, Kel. Talumolo Kec. Dumbo Raya
- ~Koperasi Konsumen Semoga Berkah Selalu, Kel. Donggala Kec. Hulonthalangi
- ~Koperasi Konsumen Murni Lestari Sejahtera, Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sibatana

Kabupaten Pohuwato

- ~ Koperasi Simpan Pinjam Al-Ihlas, Desa Soginti Kec. Paguat

Kabupaten Bone Bolango

- ~ Koperasi Produsen Multi Prima Jaya, Koperasi Produsen Multi Prima Jaya

- Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK)

Dengan jumlah pagu Anggaran Rp. **2.452.964.000,-** penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 berjumlah Rp. **2.415.630.995,-** dengan persentase keuangan 98,48 % dan persentase fisik 100 %, dengan silva berjumlah Rp. **37.333.005,-**. Pencairan dana sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tahapan yaitu Pencairan Tahap I sesuai Rencana Arus Kas (RAK) berjumlah **Rp. 1.225.482.400,-** Dan Tahap II berjumlah **Rp. 1.227.481.600,-**

**Terdiri atas:**

**a. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi**

Pagu anggaran kegiatan ini adalah **Rp. 1.339.603.524,-** dengan pencairan 2 (dua) Tahap I, **Rp. 681.939.663,-** dan Tahap II, **Rp. 657.663.861,-** penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2021 Rp.

**1.308.915.165,-** . capaian **97,71%** Dengan silva sebesar Rp. 30.688.359- (sisa belanja makan minum aktivitas lapangan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Koperasi)

Output kegiatan ini adalah dilaksanakan 13 DIKLAT diikuti oleh 167 koperasi yang pesertanya dari pengurus, pengawas dan pengelola koperasi dengan



jumlah 390 peserta yang terdiri dari IV (empat) Angkatan yaitu sebagai berikut

Angkatan I : Pelaksanaan Tanggal 27 s.d 30 Mei 2022

1. Diklat Akses Permodalan Koperasi : 30 peserta
2. Diklat Pemeriksaan Kesehatan Koperasi : 30 peserta
3. Diklat Kompetensi Bagi Juru Buku Koperasi : 30 peserta
4. Diklat Restrukturisasi Usaha Koperasi : 30 peserta

Angkatan II : Pelaksanaan Tanggal 14 Juli s.d 17 Juli 2022

1. Diklat Akuntansi Koperasi : 30 peserta
2. Diklat Dasar Koperasi : 30 peserta

Pelaksanaan Tanggal 17 s.d 20 Juli 2022

3. Diklat Manajemen Perkoperasian : 30 peserta

Angkatan III : Pelaksanaan Tanggal 27 s.d 30 Oktober 2022

1. Diklat Mekanisme Penyelenggaraan RAT (1) : 30 peserta
2. Diklat Akuntansi Koperasi : 30 peserta
3. Diklat Kewirausahaan Koperasi : 30 peserta

Angkatan IV : Pelaksanaan 31 Oktober s.d 03 November 2022

1. Diklat Mekanisme Pelaksanaan RAT (2) : 30 peserta
2. Diklat Akuntansi Koperasi Berbasis IT : 30 peserta
3. Diklat Pengawasan Koperasi : 30 peserta

#### **b. Peningkatan Kapasitas SDM UMKM**

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.113.360.476,- . Penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 Rp. 1.106.715.830,- atau 99,40 % Dengan silva sebesar Rp. 6.644.646,-

*Outcome* : meningkatnya kapasitas SDM UMKM (300 orang/peserta)

*Output* kegiatan ini adalah pelaksanaan 11 kegiatan pelatihan Bagi Pelaku Usaha di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, dan kabupaten Pohuwato, dengan jumlah peserta sebanyak 330 peserta dan 1 (satu) diklat layanan hukum yang terdiri dari 1 (satu) angkatan yaitu :

Angkatan I : Pelaksanaan Tanggal 24 s.d 27 Mei 2022



1. Diklat Strategi Manajemen Pemasaran : 30 peserta
2. Diklat Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi UMKM : 30 peserta
3. Diklat Pengenalan Sistem Pembayaran Digital : 30 peserta
4. Diklat Membangun Mindset Wirausaha : 30 peserta
5. Diklat Sertifikasi Keamanan Pangan Bagi UMKM : 30 peserta

Pelaksanaan Tanggal 21 s.d 24 Juli 2022

1. Diklat Inovasi Packaging produk Bagi UMKM : 30 peserta

Pelaksanaan Tanggal 28 s/d 31 Oktober 2022

2. Diklat Sistem Jaminan Halal Bagi UMKM : 30 peserta

Pelaksanaan Tanggal 28 s/d 31 Oktober

3. Diklat Layanan Bantuan & Pendampingan Hukum : 30 peserta
4. Diklat Fotografi Produk bagi UMKM : 30 peserta
5. Diklat Strategi manajemen Pemasaran Produk bagi UMKM : 30 Peserta
6. Diklat Mindset & manajerial Bisnis Bagi UMKM : 30 peserta
7. Diklat Teknik Pemasaran Digital bagi UMKM 30 Peserta

### *Sasaran Strategis II: Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas*

#### **1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Kalangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.

Outcome program adalah jumlah UKM yang dibina/naik kelas dengan mencapai realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,50%.

Pagu anggaran 2022 pada program ini berjumlah Rp. 318.627.570,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2022 berjumlah Rp. 315.048.665,- dan silva sebesar Rp. 3.578.905,-. (berupa sisa belanja atk, bahan cetak, honorarium narasumber yang tidak dapat direalisasikan) adapun untuk capaian kinerja Realisasi Fisik 100 % dan Realisasi keuangan mencapai 98,88% dari target 100%.



*Output Kegiatan ini adalah :*

- a. Kegiatan Bimtek OSS (online Submission System) yang diikuti oleh 25 UKM di Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Terlaksananya Coaching Clinic di Kota Gorontalo sebanyak 4 kali yaitu :
  - Memulai Bisnis dengan benar Peserta 15 UMKM tanggal 31 Agustus Lokasi Mes Haji Provinsi Gorontalo
  - Produk dan Marketing Peserta 13 UMKM tanggal 9 September Lokasi YUMME O Mart
  - Intelegency Financial Peserta 6 UMKM tanggal 19 Oktober lokasi Hotel Grand Q Kota Gorontalo
  - Operation excellent Peserta 8 UMKM tanggal 20 Oktober lokasi Hotel Grand Q Kota Gorontalo
- c. Fasilitasi Legalisasi Asosiasi UMKM Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang diserahkan kepada 6 (enam) asosiasi UMKM se Provinsi Gorontalo yaitu :
  - Asosiasi Cemerlang, di Kabupaten Bone Bolango
  - Asosiasi Asyik-Go di Kabupaten Gorontalo
  - Asosiasi Smart City di Kota Gorontalo
  - Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Boalemo
  - Asosiasi UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara
  - Asosiasi Geraha EK Kreatif di Kabupaten PohuwatoFasilitasi legalisasi asosiasi UMKM ini bertujuan untuk mendorong UMKM disetiap wilayah mempunyai wadah kelembagaan yang sudah terlegalisasi sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya
- d. Pemutakhiran Data UMKM yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi data UMKM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo “SiapAku”. Yang berisi tentang data UMKM se-Provinsi Gorontalo yang up-date.

## 2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Pagu awal untuk program ini berjumlah Rp. 1.220.927.275,- kemudian direvisi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu gedung ruang produksi factory



sharing yang semula penganggarannya terdapat di program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi direvisi ke program pengembangan UKM dengan alasan yaitu gedung ruang produksi (factory sharing) merupakan bantuan/belanja yang akan diserahkan ke masyarakat produksi ini akan dikelola oleh desa dan akan menjadi tempat produksi bersama para pelaku UKM serta menjadi galeri promosi UKM dan tidak menjadidi aset dinas. Di tahun 2022 program ini mendapat tambahan APBD-P sebesar Rp. 222.401.958,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang diperuntukkan untuk keikutsertaan pada pelaksanaan G-20 Bali Summit, verifikasi penerima manfaat UKM/IKM serta tambahan honor untuk tenaga pelayanan umum sehingga total anggaran yang bersumber dari DAU 2022 pada program ini berjumlah Rp. 1.543.329.23,- kemudian, melalui sumber dana DID periode 1 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) yang diperuntukkan untuk bantuan ekonomi produktif bagi UMKM di Provinsi Gorontalo. Untuk DID periode 1 ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah tahun Anggaran 2021 Sehingga total anggaran program ini tahun 2022 sebesar Rp. 1.943.329.233,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Dengan capaian kinerja fisik 100% dan realisasi keuangan 99,64% dari target 100%. Outcome dari program adalah jumlah UKM yang dibina/naik kelas sebanyak 75 UKM naik kelas tahun 2022.

*Output kegiatan ini adalah :*

- a. Terlaksananya Kegiatan Gebyar UMKM pada tanggal 25 s/d 28 Februari Grand Q dan City Mall Kota Gorontalo dengan jenis Kegiatan sebagai berikut :
  - Lomba Inovasi Prodak Bagi UMKM dengan jumlah peserta 35 UMKM
  - Lomba Foto Produk dengan jumlah peserta 21 UMKM
  - Lomba Vidio Produk dengan jumlah peserta 10 UMKM
  - Lomba membuat Hampers dengan jumlah peserta 6 UMKM
  - Serta Pameran Produk UMKM tingkat Provinsi Gorontalo dengan jumlah peserta 64 UMKM



- Fasilitasi Layanan UMKM (UMKM service) diantaranya :
  - Fasilitasi Desain Kemasan Dari Dinas KUMPERINDAG Prov. Gorontalo
  - Fasilitasi rumah Kemasan ke Bela Pengadaan UMKM Gorontalo
  - Fasilitasi Pelayanan Perizinan melalui OSS dari DMPTSP Prov. Gorontalo
  - Fasilitasi PIRT dan MD dan dari BPOM
  - Fasilitasi HAKI dan Perseroan perorangan dari KEMENKUMHAM Provinsi Gorontalo
  - Fasilitasi Halal dari BPJPH KEMENAG dan MUI serta LPPOM Provinsi Gorontalo
- b. Terlaksananya Kegiatan kelas Bisnis bagi pelaku UMKM di kecamatan Wonosari yang di laksanakan 4 kali dengan Jumlah peserta sebanyak 100 UMKM :
  - Branding Produk bagi UMKM Aula Desa Trirukun 25 Peserta UMKM
  - HPP (Harga Pokok Produksi) Wiasat Religi Desa trirukun 25 Peserta UMKM
  - Laporan Keuangan Aula Desa Bongo III 25 Peserta UMKM
  - BMC (Bisnis Model Canvas) Aula Desa harapan 25 Peserta UMKM
- c. Terlaksananya kegiatan Mentoring Bisnis UMKM Berbasis Syariah bagi 10 PONTREN dan LKSA yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tema “Pentingnya Mindset Wirausaha bagi Pelaku UMKM di Pondok Pesantren dan LKSA” dan “ Membangun Branding Produk bagi Pelaku UMKM di Pondok Pesantren dan LKSA
- d. Terlaksananya Bantuan Bahan Produksi bagi UMKM pada tahun 2022 Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo di bagi menjadi tiga wilayah yaitu Kota dan Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara serta Pohuwato dan Boalemo dengan jumlah UMKM yang diberikan bantuan sejumlah 385 UKM dengan Total anggaran Rp. 770 .000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh juta rupiah)
- d. Bantuan Alat dan Bahan Produksi bagi PONTREN dan LKSA sejumlah 10 Pontren dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yaitu :
  - LKS Ummu Syahidah. Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Sawit Kel. Buladu Kec. Kota Barat. Kota Gorontalo.
  - LKSA Harapan Umat. Jenis produksi industri pengolahan. Kel. Tamalate Kec. Kota Timur. Kota Gorontalo



- LKSA Moosalamati . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Kancil Kel. Buliide Kec. Kota Barat. Kota Gorontalo
  - Sanggar Tuna Runggu . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Yusuf Hasiru Kec. Sibatana. Kota Gorontalo
  - Pondok Pesantren Khairul Hikmah. Jenis produksi industri pengolahan. Desa Longalo Kec. Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango
  - LKSA Al-Inayah . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Mukhlis Rahim Desa Timbuolo Timur Kec. Botupingge Kabupaten Bone Bolango
  - LKSA Aisyiah. Jenis produksi industri pengolahan. Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo
  - LKSA Amal Sholeh . Jenis produksi industri pengolahan. Desa tilote Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo
  - LKSA Ar- Rahman . Jenis produksi industri pengolahan. Jl. Arifin Badu Desa Iluta Kec. Batudaa. Kabupaten Gorontalo
  - Pondok Pesantren Darul Madinah, Jenis produksi industri pengolahan. Desa Jatimulya Kec. Wonosari Kabupaten Boalemo.
- e. Terlaksananya 1 (satu) Factory Sharing di Kecamatan Wonosari Desa Trirukun dengan Pagu anggaran Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- f. Terlaksananya Bantuan 10 buah Both bagi pelaku UMKM di lingkungan kantor Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo
- g. Terlaksanakannya kegiatan Side Event Pameran Presidensial G20 di Bali Terfasilitasinya pembentukan Asosiasi UMKM kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo

### *Sasaran Strategis III : Meningkatnya Pertumbuhan IKM*

#### **1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

Outcome dari program ini adalah jumlah IKM yang dibina dengan target renja 200 IKM dan target Renstra 15.339 IKM

Pelaksanaan program :

#### **Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**

##### **❖ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah industri agro terpadu.



Pagu awal anggaran pada sub kegiatan ini senilai Rp. 319.052.183,- kemudian mengalami revisi sebesar Rp. 67.200.000,- dari item belanja jasa tenaga kebersihan ke sub kegiatan kordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan peberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat sehingga total pagu anggaran untuk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 251.852.183,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 90,97%.

*Output kegiatan* ini adalah :

- a. Kegiatan Pelatihan Perencanaan Pemasaran Produk IKM yang diikuti oleh 20 IKM Pangan, Kerajinan dan perbengkelan dengan anggaran
- b. Pembuatan Alat pakan
- c. Pemeliharaan Gedung KIAT
- d. Revitalisasi Peralatan KIAT (mesin pakan)
- e. Bahan Baku untuk kemasan senilai Rp. 29.790.203,- yang dipersiapkan untuk UPTD kemasan Berupa aluminium foil 10 roll, kertas sticker 450 lembar, toner color laserjet, palstik standing pouch 3000 lembar dengan 3 ukuran

❖ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah IKM yang Bersertifikat dan terampil tentang pengolahan pangan.

Dalam melaksanakan kegiatannya didukung oleh anggaran 2022 sebesar Rp. 876.168.575,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) .

Dimana penganggaran induk APBD 2022 untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 602.821.173,-. Kemudian pada APBD-P sebesar Rp. 123.270.042,- yang diperuntukkan untuk kekurangan pembayaran Honorarium PTT, perjalanan dinas untuk Identifikasi verifikasi fasilitasi bantuan IKM untuk tahun 2023 dan fasilitasi bantuan bagi IKM. Sub kegiatan ini juga mendapat tambahan anggaran dari sumber dana DID periode 1 sebesar Rp. 150.077.360,-

*Output kegiatan* ini :

- a. Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di laksanakan di Kabupaten Pohuwato yang diikuti oleh 20 IKM pada bulan Mei Tahun 2022



- b. Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di laksanakan di Provinsi Gorontalo yang diikuti oleh 20 IKM dilaksanakan pada bulan Agustus 2022.
- c. Pelatihan Pengembangan WUB IKM Pangan di Provinsi Gorontalo bulan Februari 2022 diikuti oleh 20 Peserta.
- d. Fasilitasi Kemasan untuk 20 IKM Pangan dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2022. Fasilitasi ini diberikan untuk meningkatkan daya saing produk IKM Pangan.
- e. Fasilitasi Halal untuk 20 IKM Pangan dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2022.
- f. Fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, listrik dan penerbitan izin usaha untuk 4 (empat) IKM Pangan yang dilaksanakan pada bulan Maret dan April Tahun 2022 yaitu :
  - IKM Irna Cookies & Bakery Kab.Pohuwato
  - IKM Mafahim Kab.Gorontalo
  - IKM Moringa Kab.Gorontalo
  - IKM Usaha Barokah Kab.Gorontalo Utara
- g. Bantuan Pengembangan WUB yaitu fasilitasi pembangunan rumah produksi, bahan dan peralatan, pemasangan listrik dan penerbitan izin usaha (akta notaris) untuk 1 (satu) IKM yaitu IKM Pongkep Jaya (Desa Otiola Ponelo Kepulauan Kab.Gorontalo Utara) dengan anggaran sebesar Rp 47.500.000,-
- h. Fasilitasi Peralatan Meubel dan Furniture bagi 4 (Empat) IKM Meubel dengan anggaran total Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yaitu :
  - a. Meubel Rivrey (Kab.Gorontalo)
  - b. Meubel Kayu Nantu (Kab.Gorontalo)
  - c. Meubel Kharisma (Kab.Bone Bolango)
  - d. Meubel Ainan (Kota Gorontalo)
- i. Bantuan Pengembangan WUB yaitu fasilitasi pembangunan rumah produksi, bahan dan peralatan, fasilitasi pemasangan listrik dengan anggaran sebesar Rp 133.500.000,- untuk 3 (tiga) IKM Pangan yaitu :
  - IKM 3 Putra Cake & Cookies (Kab.Gorontalo)
  - IKM Ilham Cookies (Kab.Gorontalo)
  - IKM Mohoingo /Gula Semut (Kab.Gorontalo Utara)



(sumber dana DID Periode 1)

- I. Sosialisasi Wira Usaha Baru di Provinsi Gorontalo sebesar Rp 14.377.402,-  
(sumber dana DID Periode 1)

- **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah industri kimia, kerajinan, sandang dan aneka yang dibina penguasaan teknologi.

Pagu awal pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 753.706.733,- kemudian mendapat tambahan anggaran melalui dari kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi sejumlah Rp. 67.200.000,- yang diperuntukkan untuk tambahan perjalanan dinas dalam daerah kemudian tambahan APBD-P sebesar Rp. 319.948.206,- sehingga anggaran melalau sumber dana APBD sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1.140.854.939,-. Melalui sumber dana DID periode 1 sub kegiatan ini bertambah anggarannya sebesar Rp. 851.500.000,- dan DID Periode 2 sebesar Rp. 165.212.000,-. Sehingga total anggaran total sejumlah Rp. 2.157.566.939,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.967.417.472,- . Anggaran ini untuk melaksanakan beberapa kegiatan seperti pada uraian dibawah ini.

*Output kegiatan ini adalah :*

1. Pelatihan pengembangan Wirausaha Baru

Tujuan :

- ❖ Memberikan pembekalan kepada calon penerima stimulan agar dapat mengelola stimulan berupa bantuan sarana dan parasana usaha untuk lebih produktif;
- ❖ Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk.

Outcome :

Untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin pelaku/kelompok usaha industri kecil dan menengah yang mandiri dan profesional sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru, bagi lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan potensi SDA dan SDM yang tersedia serta meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, dan bisa memanfaatkan peluang pasar lokal, regional, nasional dan ekspor produk

Output :



Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM IKM Kerajinan sebanyak 30 orang.

## 2. Workhop E- Smart bagi IKM

### Tujuan :

- ❖ Meningkatkan akses pasar IKM melalui *internet marketing*;
- ❖ Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk.

### Outcome :

Untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin pelaku/kelompok usaha industri kecil dan menengah yang mandiri dan profesional sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru, bagi lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan potensi SDA dan SDM yang tersedia serta meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, dan bisa memanfaatkan peluang pasar lokal, regional, nasional dan ekspor produk

### Output :

Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM IKM Kerajinan sebanyak 25 orang pelaku usaha industri kimia sandang aneka dan kerajinan.

## 3. Pelatihan Desain dan Padu padan Warna Sulaman Karawo

### Tujuan :

- ❖ Meningkatkan Pengetahuan Desainer dan perajin karawo dalam mendesain dan memadupadankan fashion karawo ;
- ❖ Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk.

### Outcome :

Untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin pelaku/kelompok usaha industri kecil dan menengah yang mandiri dan profesional sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru, bagi lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan potensi SDA dan SDM yang tersedia serta meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, dan bisa memanfaatkan peluang pasar lokal, regional, nasional dan ekspor produk

### Output :



meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM IKM Kerajinan sebanyak 25 orang.

4. Stimulasi sarana dan prasarana untuk penumbuhan dan pengembangan usaha industri kecil dan menengah.

Tujuan :

- ❖ Untuk menormalisasi aktifitas produktif para pelaku industri kecil dan menengah.

Outcome :

- mendorong terciptanya sebanyak mungkin pelaku/kelompok usaha industri kecil dan menengah yang mandiri dan profesional
- menciptakan lapangan kerja baru bagi lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan potensi SDA dan SDM yang tersedia.

- a. Stimulan yang diberikan melalui APBD tahun 2022 kepada 3 IKM yaitu :

- IKM Sumber Usaha Karawo (Kab. Gorontalo)
- IKM Dkorsase (Kota Gorontalo)
- IKM Belgina (Kab. Bone Bolango)

Adapun jenis stimulan masing-masing IKM sebesar Rp. 47.500.000 berupa :

- Untuk pembuatan/renovasi bangunan usaha ;
- Peralatan dan bahan/ material penunjang usaha;
- Pemasangan Listrik; dan
- Pembentukan Badan Usaha

- b. Stimulan melalui APBDP tahun 2022 berupa Mesin Jahit kepada 8 IKM dengan anggaran sebanyak Rp. 62.000.000.- yaitu :

No	Nama	Alamat
1	Tiar Craft	Kel. Limba U II Kecamatan Kec. Selatan Kota Gorontalo
2	Lala Craft	Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo
3	Hasni Mosii	Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
4	Irmayanti	Kecamatan Limboto. Kab. Gorontalo
5	Vidyatum Mboka	Kelurahan Leato Selatan Kec. Dumbo Raya



6	Wirda Amin	Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo
7	Farida Mohamad	Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo
8	Nifralinsa Lamhairi	Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sibatana Kota Gorontalo

c. Stimulan melalui sumber dana Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 diberikan kepada 3 IKM Kerajinan masing masing sebesar Rp. 44.500.000.- yaitu :

- Hartati Bakri (Itatzs Mode) Kab. Gorontalo
- Alifah A. Sh Jusuf (Farabi Collection) Kab. Bone Bolango
- Gilbert (Gkarawo) Kab. Gorontalo

Bantuan yang diberikan berupa :

- Untuk pembuatan/renovasi bangunan usaha ;
- Peralatan dan bahan/ material penunjang usaha;
- Pemasangan Listrik

Output :

meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat

5. Rakernas dan Pameran Dekranas di Jakarta

Tujuan :

- ❖ Meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan daya saing global berbasis konten lokal guna menggali dan mengembangkan warisan budaya.
- ❖ Mendorong Perluasan Akses Pasar Bagi Produk-Produk Kerajinan Unggulan Gorontalo.

Outcome :

- ❖ Untuk meningkatkan daya saing produk IKM.

Pada Rakernas Dekranas diikuti oleh Pengurus Dekranasda yaitu Ketua Dekranasda dan Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Gorontalo. Sedangkan Pameran Dekranas/Kriya Nusa melibatkan 3 orang perajin dari Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.



Output :

Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat khususnya pelaku IKM  
Kerajinan

• **Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri**

*Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah* Jumlah IKM Logam, Mesin dan elektronika yang dibina penguasaan teknologi

Pagu awal anggaran sub kegiatan ini berjumlah Rp. 287.297.739,- kemudian pada APBD-P bertambah sejumlah Rp. 89.290.000,- dan melalui sumber dana DID periode 1 sebesar Rp. 98.422.640,- yang diperuntukkan untuk bantuan bagi kelompok peternakan/pembibitan ayam dan bantuan peralatan untuk kelompok IKM ILMEA serta makan minum pelaksanaan rapat.

Total akhir pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 475.010.379,- dengan realisasi sebesar Rp. 471.701.451,-

*Output kegiatan ini adalah :*

a. Bantuan untuk kelompok IKM IIMEA

- Bantuan Bahan dan peralatan IKM senilai Rp. 22.500.000,- (Abd. latif Yunus, Desa Boliohuto. Kabupaten Gorontalo)
- Bantuan Bahan & peralatan IKM, Fasilitas pemasangan listrik, peneribitan izin tempat usaha, peralatan dan fasilitasi tempat usaha senilai Rp. 45.000.000,- ( Sofyan Bahua. Kecamatan Limboto. Kabupaten Gorontalo)
- Fasilitasi bahan & peralatan IKM, pemasangan listrik & Fasilitasi tempat usaha senilai Rp. 44.500.000 (M. Rafik. Zayn Motor Desa Dutulanaa. Kec. Limboto. Kabupaten Gorontalo)

b. Bantuan Peralatan perbengkelan bagi 3 (tiga) IKM ILMEA yaitu :

- Seprin Ahmad Desa Talango. Kabupaten Gorontalo Utara
- Rizki Mooduto, Kabupaten Bone Bolango
- Bengkel Al-Mutazam Desa Buntulia. Kabupaten Pohuwato

c. Pelatihan Pembuatan Oven Pengering Olahan Pangan dengan jumlah peserta 20 IKM perbengkelan selama 3 hari



- d. Bantuan bagi kelompok peternakan/pembibitan ayam *sumber dana DID Periode 1* yaitu bantuan bahan & peralatan IKM, Fasilitas Tempat Usaha dan Pakan ternak Ayam di Kabupaten Bone Bolango Rp. 51.262.640,-

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

**Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**

**Sub kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**

Pagu sub kegiatan sejumlah Rp. 155.345.400,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 152.309.100,- dan realisasi keuangan sebesar 98,05% dan realisasi fisik 100%.

Indikator Output sub kegiatan ini adalah data informasi IKM.

*Output kegiatan* ini adalah:

- a. Sosialisasi Aplikasi sistem informasi yang dilaksanakan di Kota Gorontalo. Peserta adalah Aparat pembina dari dinas Perindustrian dan operator Kabupaten/Kota.
- b. Penganggaran untuk honorarium 2 (dua) orang pengumpul dan pengolah data IKM di kab/kota yang dibayarkan setiap triwulan. Dimana tugas dari pengumpul data ini yaitu mengumpulkan data
- c. Terlaksananya Pembuatan Aplikasi sistem informasi berbasis web Sistem Informasi Digital Industri Gorontalo (SIIDIG)

Aplikasi Directory Data IKM Provinsi Gorontalo (jumlah IKM, Nilai investasi, nilai produksi, jumlah tenaga kerja, klasifikasi per cabang industri)

### Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri

#### 1. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Outcome dari program ini adalah jumlah perdagangan antar pulau dengan target 3600 kali dan capaian 4033 kali (*Realisasi perdagangan antar pulau merupakan nilai akumulasi capaian tahun 2021 yaitu sebanyak 3808 kali ditambahkan dengan jumlah perdagangan antar pulau posisi sampai November 2022 sebanyak 225 kali*)



Pelaksanaan Program :

**Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**

**✚ Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Untuk pelaksanaan sub kegiatan ini didukung oleh anggaran total sampai Desember 2022 sejumlah Rp. 8.684.927.048,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2022 berjumlah Rp. 8.150.596.558,- (93,85% keuangan dan 100% fisik).

Anggaran induk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 942.857.048,- kemudian bertambah melalui revisi sebesar Rp. 152.460.000,- dari sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan tambahan anggaran melalui APBD-P sejumlah Rp. 595.860.000, yang diperuntukkan untuk item belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 496.250.000,- dan operasional pelaksanaan operasi pasar (perjalanan dinas dalam daerah) Rp. 94.330.000,-. serta tambahan honorarium PTT. Sehingga total anggaran yang bersumber dari DAU 2022 untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1.691.177.048,-

Kemudian dengan Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah tahun Anggaran 2021, sub kegiatan ini mendapat tambahan anggaran dari sumber dana DID periode 1 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (peruntukkan untuk item belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 4.421.250.000,- dan belanja pendukung operasi pasar seperti belanja cetak kupon, spanduk dan sewa tenda Rp. 78.750.000,-) dan tambahan pada DID periode 2 (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada



Tahun 2022) sebesar Rp. 2.493.750.000,- yang diperuntukan untuk item belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Sehingga total sampai Desember 2022 sejumlah Rp. 8.684.927.048,-

*Output kegiatan ini adalah :*

- a. Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi tahun 2022 ditargetkan sebanyak 150 kali yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk sekali pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi, ditargetkan dapat melayani 1000 kpm hingga 2500 kpm (Kelompok Penerima Manfaat). Adapun total anggaran untuk mendukung pelaksanaan Operasi pasar Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi yaitu bahan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2022 sebanyak Rp. 8.212.500.000,- (dari sumber dana APBD 2022 sebanyak Rp. 801.250.000,-, finalisasi APBD-P Rp. 496.250.000,- kemudian tambahan dari sumber dana DID periode 1 sejumlah Rp. 4.421.250.000 dan DID periode 2 sejumlah Rp. 2.493.750.000,-). Penambahan anggaran pada sub kegiatan karena adanya situasi kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) secara internasional, yang mengakibatkan kelangkaan stok serta kenaikan harga minyak goreng secara nasional, ditambah lagi dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melalui Bidang Perdagangan mengalokasikan anggaran tersebut yang masuk secara bertahap baik melalui dana APBD-P hingga Dana Insentif Daerah (DID), Pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah dilakukan melalui Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi. Kegiatan ini dilakukan menjelang hari besar keagamaan (HBKN), saat adanya potensi kenaikan harga komoditi barang kebutuhan pokok dan kegiatan yang terkait pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan bencana. Dengan menyediakan secara keseluruhan atau sebagian diantaranya yaitu komoditi antara lain beras, minyak goreng dalam kemasan, gula Kristal putih bukan rafinasi, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dari Target 150 kali pelaksanaan, yang terlaksana hingga 28 Desember 2022 sebanyak 33 kali pelaksanaan dan melayani 65.000 KPM.



Outcome : memenuhi kebutuhan pokok masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo.

- b. Pemantauan Harga Barang Pokok di Pasar Rakyat di Kabupaten/Kota sebanyak 6x, dilakukan dalam rangka mengidentifikasi ketersediaan stok barang pokok, sekaligus mengumpulkan informasi harga barang pokok yang berlaku saat itu di Pasar Rakyat, apakah terjadi kenaikan harga ataukah terjadi penurunan harga, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan, ataupun dasar pelaksanaan Operasi Pasar/ Kebutuhan Pokok Bersubsidi.
- c. Honorarium pengolah data dan operator Sistem Perdagangan Antar Pulau untuk mengimput data bongkar muat antar muat/antar Provinsi yang sumber data dari pelabuhan bongkar muat di Provinsi Gorontalo

### **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**

#### **✚ Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi**

Anggaran untuk mendukung kegiatan ini tahun 2022 sebesar Rp. 88.645.191,- dari pagu induk sejumlah Rp. 241.105.191, kemudian direvisi ke sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebesar Rp. 152.460.000,-

#### *Output Kegiatan :*

- a. Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali  
Pengawasan dikhususkan untuk pupuk bersubsidi, mulai dari alokasi kuota pupuk bersubsidi di tiap Kabupaten/Kota, proses pendistribusiannya, penerapan harga eceran tertinggi, hingga kesesuaian penerima alokasi pupuk bersubsidi. Secara umum hasil kegiatan pengawasan berjalan dengan lancar, namun belum begitu efektif karna terbatas dengan ketersediaan anggaran. Permasalahan mulai adanya keterlambatan pendistribusian pupuk bersubsidi, masih adanya petani yang ingin membeli pupuk subsidi, namun belum terdaftar dalam sistem E-RDCK, hingga adanya indikasi penjualan pupuk subsidi yang tidak sesuai (baik kuota, lokasi, hingga penerima pupuk), semuanya bisa diawasi dan dikoordinasikan dengan pihak produsen maupun



distributor untuk penyelesaian permasalahannya, dan jika ada pelanggaran cukup ditindak-lanjuti dengan sanksi administrasi

Pelaksanaan Rapat koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida dilaksanakan sebanyak 2 kali di Provinsi Gorontalo

## 2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sub Kegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional

Anggaran yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan ini berjumlah Rp. 284.130.413,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 271.011.547,- (95,38% keuangan, dan 98,59% fisik).

*Outcome* dari program adalah Jumlah ekspor dengan target sebanyak 12 komoditi dan capaian 11 komoditi atau 91,66% capaian.

*Output kegiatan* ini adalah :

### b. Kegiatan Misi Dagang di Provinsi Sulawesi Selatan

Kegiatan Misi Dagang dilaksanakan pada bulan maret tahun 2022 dan diikuti oleh 6 (enam) Pelaku Usaha Dari Gorontalo yaitu Rahida Cookies Gorontalo (Aneka Kue kering, Komunitas Bisa Ekspor Gorontalo (komoditi cengkeh, kelapa, kemiri, jagung, mente, kayu manis dan pala), IKM Madu Suwawa (Produk Madu), IKM Moringa Gorontalo (Teh celup daun kelor, sarabba kelor, serbuk daun kelor), IKM Azzarah (Bahan Karawo, Dasi Karawo, Kopianj Karanji), IKM Aren GO (Gula Aren).

### c. Pameran Dagang

Keikutsertaan pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke 37 yang merupakan agenda promosi di sektor perdagangan, pariwisata dan investasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Kegiatan pameran diikuti 2 (dua) IKM yaitu IKM Belgina Collection (produk kerajinan karawo) dan UKM Say Factory (produk Pangan).

### d. Identifikasi komoditi ekspor di kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo



- e. Kegiatan Pembinaan UKM yang memahami prosedur ekspor tahun 2022 pelaksanaannya didukung melalui sumber dana APBN akan tetapi di tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan ini di refocusing anggarannya.

Tabel 3.14  
REKAP REALISASI EXPORT BERDASARKAN KOMODITI  
SELANG BULAN DESEMBER 2022

No.	Jenis Komoditi	Jumlah komoditi (Kg)	Nilai Export (USD)	Negara Tujuan	Exportir
1	Ikan Tuna	17.279,10	190.320,80	Malaysia, Jepang, Malaysia, Bangkok	CV. Camar Laut, CV. Baris Anugerah
2	Molases	32.702.770	5.365.864	Vietnam, Filipina	PT. Pabrik Gula Gorontalo
3	Kelapa Parut	4.903.610	10.230.289,84	Wilayah Eropa, China	PT. Royal Coconut, PT. trijaya Tangguh
4	Santan	517.000	635.850,21	China	PT. Royal Coconut, PT. Trijaya Tangguh
5	Biji Kakao	5	214,29	Japan	
6	Ijuk	39	107,14	Japan	
7	Siauw Nutmeg (biji pala)	15.000.000	160.500,00	Belanda	
8	Jagung	82.950.000	25.097.450,00	Filipina	PT.Seger Agro Nusantara, PT Dwi Karya Makmur, PT. Sinar Pangan Abadi
9	Wood Pelet	20.704.777	3.204.193,00	Korea	
10	Briket	18.000	5.400,00	Arab Saudi	CV. Nature Birkah
11	Gula Aren	1.476	3.303,39	Dubai, Jepang	KTH unit VI Gorontalo (Aren Go)
	<b>JUMLAH</b>	<b>156.814.956,10</b>	<b>44.893.492,67</b>		



## Sasaran Strategis V : Meningkatnya Perlindungan Konsumen & Pengawasan Perdagangan

*Outcome* dari program adalah Jumlah sertifikasi mutu barang dengan target 3 sertifikat dan capaian 12 sertifikat.

### ❖ Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

#### Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan sub kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1.127.308.103,- . Dari anggaran induk sebesar Rp. 934.064.996,- kemudian direvisi sebesar Rp. 27.500.000,- ke program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan pada finalisasi APBD-P mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 220.743.107,- yang diperuntukkan untuk penunjang kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK di 3 (tiga) Kabupaten/Kota, monitoring dan evaluasi BPSK dan operasional BPSK.

*Output kegiatan* ini adalah :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain sidang BPSK, honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK
- b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK yang dilaksanakan di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato
- b. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di 3(tiga) Kabupaten/Kota, yakni BPSK Kabupaten Boalemo, BPSK Kabupaten Gorontalo Utara, BPSK Kabupaten Bone Bolango, dimana pelantikan dan pengambilan sumpah pada Bulan September Tahun 2022. BPSK ini beranggotakan 9 (Sembilan) Orang anggota dan Sekretariat BPSK beranggotakan 3 (tiga) orang anggota
- d. Sosialisasi BPSK di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo



sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPSK juga di laksanakan oleh anggota BPSK di setiap pelaksanaan pasar murah di kabupaten kota sesuai dengan lokasi pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

- e. Jumlah Pengaduan Konsumen Provinsi Gorontalo sebanyak 91 Kasus pengaduan, dan yang diselesaikan 91 kasus antara lain tentang Pengaduan permasalahan pembiayaan, Pengaduan mengenai pengkreditan melalui Bank, Pengaduan Klausula Baku
- f. Penyelesaian sengketa Konsumen :
  - BPSK Kabupaten Pohuwato ditahun 2022 menerima 17 kasus dan diselesaikan secara mediasi
  - BPSK Kota Gorontalo, 12 kasus dan penyelesaian sengketa secara mediasi 12 kasus
  - ~ BPSK Kabupaten Gorontalo ditahun 2022, menerima 17 kasus, yang diselesaikan melalui mediasi 4 kasus, arbitrase 7 kasus, masih dalam proses 2 kasus, pembatalan permohonan 4 kasus
  - ~ BPSK Kabupaten Boalemo, menerima 12 kasus ditahun 2022. Masih dalam proses 3 kasus, mediasi 1 kasus, arbitrase 2 kasus dan 2 kasus dibatalkan oleh pemohon, menunggu putusan 4 kasus
  - ~ BPSK Kabupaten Bone Bolango yang dilantik di bulan September 2022 belum menerima kasus pengaduan di tahun 2022
  - ~ Kabupaten Gorontalo Utara, 2 kasus telah diselesaikan dan 1 kasus dalam proses

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian**

Jumlah pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini ditahun 2022 sebesar Rp. 445.274.499,- dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 441.969.323,- atau 99.26 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik.

Indikator kinerja jumlah pengujian standar mutu barang, target 1200 kali, capaian 1051 kali

*Output kegiatan :*

- a. Pengambilan sampel komoditi di kabupaten/kota



- b. Pemeliharaan alat laboratorium yaitu penggantian baterai UPS 12.000 volt
- c. Kalibrasi peralatan uji laboratorium oleh lembaga kalibrasi terakreditasi.
- d. Pengujian khusus untuk komoditi akreditasi sebagai komoditi ekport yaitu jagung sejumlah 83.250 ton dengan 12 SKM yang diterbitkan
- e. Fasilitas kandungan gizi untuk UKM pangan berkemasan standar untuk tahun 2022 adalah sejumlah 53 UKM di kab/kota se Provinsi Gorontalo
- f. Uji profisiensi lada putih diselenggarakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan RI.
- g. Magang pengujian proksimat di Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Manado, Sulawesi Utara
- h. Penyediaan bahan kimia serta bahan penunjang pengujian laboratorium
- i. Mengikuti kegiatan Uji Banding antar Laboratorium, yaitu :
  - Uji banding beras yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Bandar Lampung pada tanggal 20 sd 23 juni 2022, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian komoditi beras.
  - Uji banding jagung yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi mutu barang gorontalo pada tanggal 26 sd 30 september 2022, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian komoditi jagung. Diantara 4 (empat) laboratorium, UPTD BPSMB Disperindag Provinsi sulsel, UPTD BPSMB Provinsi sulteng, UPT PSMB jember dan UPTD BPSMB Disperindag Lampung memperoleh hasil satisfactory (sangat memuaskan).
  - Uji banding rumput laut yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan sertifikasi mutu barang samarinda pada tanggal 5 sd 9 desember 2022,

#### **Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi**

Jumlah anggaran untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sejumlah Rp. 273.933.136,- dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 267.087.576,- atau 99,98 % realisasi keuangan dan 100 realisasi fisik.

Ouput dari kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha UKM yang menerapkan standar mutu barang, target 30 pelaku usaha dengan capaian sebanyak 51 pelaku usaha.

*Output kegiatan :*

**LAKIP 2022**



- a. Pengawasan mutu barang/komoditi ber-SNI di kabupaten/kota
- b. Sosialisasi penerapan standardisasi mutu komoditi beras di kabupaten/kota
- c. Sosialisasi tugas dan fungsi BPSMB melalui media cetak (Harian Gorontalo Post) dan media elektronik (TVRI)
- d. Penerapan sistem manajemen mutu
- e. Surveilens (audit eksternal) Sistem Manajemen Mutu oleh KAN
- f. Studi banding komparasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) di Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian dan BPSMB Manado, Sulawesi Utara
- g. Jejaring kerja dengan Dinas Perindag kabupaten/kota

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen**

Indikator kinerja adalah jumlah pelaku usaha yang diawasi, target 120 pelaku usaha dengan capaian 120 pelaku usaha (100%). Pagu anggaran 2022 sebesar Rp. 117.931.719,-

*Output kegiatan :*

- a. **Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan, Lokasi Pengawasan** se provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni ,Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.
  1. Untuk Barang :
    - a. Standar
    - b. Label dalam bahasa Indonesia
    - c. Petunjuk Penggunaan
    - d. Jaminan Layanan Purna Jual
    - e. Cara Menjual
    - f. Pengiklanan
    - g. Kalusula Baku



2. Untuk Jasa :
  - a. Standar
  - b. Jaminan dan/ataugaransi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
  - c. Kalusula Baku
3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi;
  - a. Perizinan di bidang perdagangan
  - b. Perdagangan Barang yang diawasi,di larang dan/atau diatur
  - c. Diatribusi
  - d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal inpor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)
  - e. Pemberlakuan SNI kualifikasi secara wajib
  - f. Pendaftaran Gudang
  - g. Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
  - h. Perdagangan melalui sistim elektronik

**Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa :**

1. Terdapatnya Besi, celokan, kabel, kipas angin, Yang belum sesuai dengan Standar Nasional
2. Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang di Kabupaten Gorontalo, toko di di Kabupaten Boalemo serta Kabupaten Puhwato, Kabupaten Gorontalo Utara

**Pengawasan Perdagangan antara lain :**

1. Distribusi
  - a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi
    - Pola Distribusi dari Produsen
    - Distributor, Agen ke Pengecer.
    - Distribusi Barang
  - b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.
    - Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.
  - c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.
2. Perijinan



- Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)
- 3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
  - Pasar rakyat
  - Pusat-pusat perbelanjaan
  - Toko swalayan
  - Gudang
  - Sarana perdagangan lainnya

### Hasil Pengawasan

1. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang
2. Untuk kota gorontalo tidak lagi mengeluarkan Tanda daftar gudang sebab daerah kota gorontalo tidak memenuhi syarat lingkungan untuk didirikan gudang.
3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin
4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya
5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnya sudah menghampiri (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian )
6. Banyak sub pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET,
7. Terdapatnya Toko-Toko yang menjual HP yang tidak Mempunyai Garansi
8. Masih terdapatnya distributor besi yang menjual Besi Beton yang sudah mempunyai SNI namun ukuran panjang diameternya tidak sesuai dengan ukuran yang di janjikan.

### B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2022, Dinas Kumperindag mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 38.167.659.004,-** anggaran ini sudah termasuk gaji, tunjangan ASN dan DAK non fisik, APBD-P serta anggaran yang bersumber dari DID periode 1 dan periode 2. Di tahun 2022 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melakukan revisi pada beberapa program kegiatan yang bersesuaian, dengan total sebesar Rp. 40.399.399,- (empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Adapun anggaran APBD-P tahun 2022 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 2.066.234.949,- kemudian



tambahan anggaran melalui sumber dana DID Periode 1 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan DID periode 2 sebesar Rp, 3.853.669.874,-  
Realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 36.173.738.155,- Adapun uraian penjelasannya sebagai berikut:

1. Pagu dan Anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan TA. 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Pagu dan realisasi Dinas Kumperindag TA. 2022 (sumber dana APBD)

✚ *Pagu Awal Tahun Anggaran 2022*

- **Belanja Operasi** : Rp. **25.327.273.004**
  - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.525.980.406
  - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 15.801.292.598
- **Belanja Modal** : Rp. **2.986.716.134**

✚ *Realisasi Anggaran :*

- **Belanja Operasi** : Rp. **24.743.256.062**
  - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.210.213.660
  - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 15.533.042.402
- **Belanja Modal** : Rp. **2.980.049.829**

Anggaran Dinas Kumperindag TA. 2022 (sumber dana DID Periode 1 & periode 2)

✚ *Anggaran Tahun 2022*

- **Belanja Operasi** : Rp. **8.658.962.000**
  - ~ Belanja Pegawai : Rp. -
  - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 8.658.962.000
- **Belanja Modal** : Rp. **1.194.707.874**

✚ *Realisasi Anggaran :*

- **Belanja Operasi** : Rp. **7.963.143.004**
  - ~ Belanja Pegawai : Rp. -
  - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 7.963.143.004
- **Belanja Modal** : Rp. **487.289.260,-**

*Sehingga Total anggaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 melalui sumber dana APBD dan DID :*

✚ *Pagu Tahun Anggaran 2022*

- **Belanja Operasi** : Rp. **33.986.235.004**
  - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.525.980.406
  - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 24.460.254.598
- **Belanja Modal** : Rp. **4.181.424.008**



✚ Realisasi Anggaran :

- **Belanja Operasi : Rp. 32.706.399.066**
  - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.210.213.660
  - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 23.496.185.406
- Belanja Modal : Rp. 3.467.339.089

Realisasi Keuangan sebesar 94,78% dan realisasi fisik 8,13% dengan sisa anggaran Rp. 1.993.920.857,- telah kembali ke Kas Daerah. Sisa anggaran ini terdiri dari :

- a. Silva dari 23 sub kegiatan Rp. 328.798.560,-
- b. Sisa belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp, 315.766.746,-
- c. Belanja kendaraan bermotor (mobil listrik Galery art (Teranggarkan pada DID Periode 2) tidak terealisasi karena untuk harga mobil plat merah masih menunggu persetujuan dari Kemendagri untuk dirilis harganya sehingga belum dapat dicantumkan harganya pada E-katalog sehingga untuk proses pengadaannya tidak dapat dilaksanakan hingga 31 Desember tahun 2022, & telah dibuatkan surat untuk dianggarkan di 2023
- d. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 520.785.327,- (Sisa DID Periode 2 untuk pelaksanaan Operasi Pasar)
- e. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kpd masyarakat = Rp. 128.570.224  
Pengadaan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) Rp. 100.000.000,- dan bahan produksi (Rp. 28.000.000) tidak terealisasi disebabkan waktu pelaksanaan untuk pengadaan yang terbatas. ATBM ini membutuhkan waktu 1 bukan lebih untuk pemesanannya (teranggarkan melalui sumber dana DID Periode 1 tahun 2022) serta pertimbangan lainnya bahwa alat ini belum bisa di operasikan oleh pengrajin karena untuk pelatihan pembuatan kain tenun tidak teranggarkan.

Adapun total alokasi anggaran belanja langsung tersebut, antara lain diperuntukkan untuk pencapaian 5 (lima) sasaran strategis utama yang terdapat pada Perjanjian Kinerja



Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian Output (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)
Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	100	98,99	98,99	10.102.024.694	9.257.962.105	91,64
Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	100	100,00	100,00	1.148.596.327	1.144.576.834	99,65
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	100	100	100	3.915.943.476	3.688.082.359	94,18
Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	100	99,28	99,28	9.057.702.652	8.505.103.205	93,90
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan	100	100	100	1.964.447.457	1.952.168.997	99,37
<b>Dana APBD</b>					<b>26.188.714.606</b>	<b>24.547.893.500</b>	<b>93,73</b>
<b>Dana DAK Non Fisik</b>					<b>2.452.964.000</b>	<b>2.415.630.995</b>	<b>98,48</b>
<b>Jumlah Belanja Barang &amp; Jasa</b>					<b>28.641.678.606</b>	<b>26.963.524.495</b>	<b>94,14</b>
<b>Belanja Pegawai</b>					<b>9.525.980.406</b>	<b>9.210.213.660</b>	<b>96,69</b>
<b>Total Belanja</b>					<b>38.167.659.012</b>	<b>36.173.738.155</b>	<b>94,78</b>

Analisis Efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3. 16. Analisis Efisiensi Dinas Kumperindag Provinsi Goorntalo Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	98,99	91,64	7,35
Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	100	99,65	0,35
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	100	94,18	5,82
Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	99,28	93,90	5,38



**Pemerintah Provinsi Gorontalo**  
**Dinas KUMPERINDAG**

Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan	100	99,37	0,63
---	--	-----	-------	------

Berdasarkan tabel 3.12 diatas terlihat bahwa kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag telah mencapai target. Adapun tingkat efisiensi terbesar pada nilai 7,35%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran pada sektor koperasi UKM perindustrian dan perdagangan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi melalui siaran radio, pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku usaha KUKM di Provinsi Gorontalo serta upaya penghematan penggunaan sarana prasarana.





## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2022 memuat laporan perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan selama kurun waktu tahun 2022.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan dalam ketersediaan anggaran dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Hasil yang telah dicapai di tahun 2022 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan dari Pimpinan (Gubernur) Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan diperoleh bahwa kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo di Tahun 2022 adapat dilihat dari capaian sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koperasi Sehat

Indikator Kinerja I : Meningkatkan Koperasi Sehat

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU I ini sebesar Rp. 10.102.024.694- dengan realisasi sebesar Rp. 9.257.962.105,- atau sebesar 91,64 % keuangan dan tingkat efisiensi 7,35%

Target kinerja 100 % dan capaian 98,99 %.

*(jumlah anggaran ini belum termasuk DAK Non Fisik Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan KUKM)*

2. Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas

Indikator Kinerja II : Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas



Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU II ini sebesar Rp. 1.148.596.327,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.144.576.834,- atau sebesar 99,65% keuangan dan tingkat efisiensi 0,35%. Target kinerja 100 % (66 UKM) dan capaian 100%.

*(jumlah anggaran ini belum termasuk DAK Non Fisik Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan KUKM)*

3. Meningkatnya Pertumbuhan IKM

Indikator Kinerja III : Jumlah Pertumbuhan IKM

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU III ini sebesar Rp. 3.915.943.476,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.688.082.359,- atau sebesar 94,18 % keuangan dan tingkat efisiensi 5,82%

Target kinerja 100% dan capaian 100% IKM

4. Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri

Indikator Kinerja IV : Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU IV ini sebesar Rp. 9.057.702.652,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.505.103.205,- atau sebesar 93,90 % keuangan dan tingkat efisiensi 5,38 %

Target kinerja 100% dan capaian 99,28%

5. Meningkatnya Perlindungan Konsumen & Pengawasan Perdagangan

Indikator Kinerja V : Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU V ini sebesar Rp. 1.964.447.457,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.952.168.997,- atau sebesar 99,37 % keuangan dan tingkat efisiensi 0,63%

Target kinerja 100% dan capaian 100%

Jumlah anggaran dan realisasi ini tidak termasuk DAK Non Fisik Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan KUKM sebesar Rp. 2.452.964.000,- dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.525.980.406,- )

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan rencana. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

Pencapaian target kegiatan dan sasaran tahun 2022 tidak hanya bersumber dari pendanaan APBD juga didukung oleh dana Dekonsentrasi. Di Tahun 2022 kinerja Dinas



Kumperindag Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan khususnya dalam pencapaian indikator program pada Renstra 2017-2022.

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja, pemanfaatan sumber dana yang tersedia semaksimal mungkin serta pemanfaatan kemampuan aparatur.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Masih banyak kendala dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian baik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun Dinas Kumperindag sendiri, antara lain proporsi anggaran pembangunan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun dirasakan sangat terbatas, mengingat dinas ini mengemban peranan dan fungsi strategis dalam upaya menggerakkan sektor riil, yang meliputi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM) dan pelaku usaha, sehingga memerlukan pendanaan yang memadai serta fasilitas berupa sarana prasarana kerja yang mendukung.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 202 telah diupayakan untuk dilaksanakan dengan optimal, jika masih terdapat kekurangan yang bersifat administratif maupun substantif kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya